

**PERAN FORUM MAHASISWA MASSENREMPULU (FORMASI)
DALAM MENGAWAL KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI KECAMATAN ANGGERAJA KABUPATEN ENREKANG**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan pada Jurusan Pendidikan Sosiologi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh

**MUHAMMAD RUM
10538 246312**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI (S1)
NOVEMBER 2017**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Muhammad Rum**, NIM 1 10538246312 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 010 Tahun 1439 H/ 2018 M, Sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar **Sarjana Pendidikan** pada Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Yudisium pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018.

27 Jumadil Awal 1439 H
Makassar, -----
12 Februari 2018 M

PANITIA UJIAN

Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM

Ketua : Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.

Sekretaris : Dr. Khaeruddin, M.Pd.

Penguji :

1. Prof. Dr. H. Irwan Akib, M.Pd.

2. Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si.

3. Dr. Eliza Meiyani, M.Si.

4. Sifti Asnaeni AM, S.Sos., M.Pd

Mengetahui

Dekan FKIP
Universitas Muhammadiyah Makassar


Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
NBM: 860 934

Ketua Prodi
Pendidikan Sosiologi


Dr. H. Nursalam, M.Si.
NBM: 951 829

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Peran Forum Mahasiswa Massenrempulu (Formasi) dalam Mengawal Kebijakan Pemerintah Daerah di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.

Nama : Muhammad Rum

NIM : 10538246312

Prodi : Pendidikan Sosiologi

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diteliti dan diperiksa ulang, skripsi ini telah memenuhi syarat untuk dipertanggung jawabkan di depan tim penguji skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 12 Februari 2018

Disahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dra. Hj. Syahribulan. K, M.Pd.


Muhajir, S.Pd., M.Pd

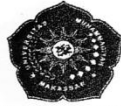
Mengetahui

Dekan FKIP
Universitas Muhammadiyah Makassar


Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
NBM: 860 934

Ketua Prodi
Pendidikan Sosiologi


Dr. H. Nursalam, M.Si.
NBM: 951 829




UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259 Fax (0411) 860 132 Makassar 90221 www.fkip-unismuh-info

KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

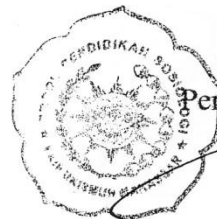
Nama : Muhammad Rum
Stambuk : 10538 246312
Jurusan : Pendidikan Sosiologi
Pembimbing : **Dra. Hj. Syahribulan. K, M. Pd**
Dengan Judul : Peran Forum Mahasiswa Massenrempulu (Formasi) dalam Mengawal Kebijakan Pemerintahan Daerah Di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang

Konsultasi Pembimbing I

No	Hari/Tanggal	Uraian Perbaikan	Tanda Tangan
	19-10-2017	Abstrak Referensi pustaka Kutipan tulisannya Ane	

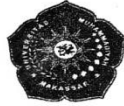
Catatan:

Mahasiswa hanya dapat mengikuti ujian skripsi jika sudah konsultasi ke dosen pembimbing minimal 3 kali



Mengetahui,
Ketua Jurusan
Pendidikan Sosiologi

Dr. H. Nursalam, M.Si.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259 Fax (0411) 860 132 Makassar 90221 www.fkip-unismuh-info

KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Rum
Stambuk : 10538 246312
Jurusan : Pendidikan Sosiologi
Pembimbing : **Muhajir S. Pd, M. Pd**
Dengan Judul : Peran Forum Mahasiswa Massenrempulu (Formasi) dalam Mengawal Kebijakan Pemerintahan Daerah Di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang

Konsultasi Pembimbing II

No	Hari/Tanggal	Uraian Perbaikan	Tanda Tangan
	19/10/17	perbaiki sesuai catatan	
	28/10/17	perbaiki sesuai Catatan	
	9/11/17	All	

Catatan:

Mahasiswa hanya dapat mengikuti ujian skripsi jika sudah konsultasi ke dosen pembimbing minimal 3 kali



Dr. H. Nursalam, M.Si.

*Suardi
16-11-2017
all*

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jangan selalu berharap tapi wujudkanlah mimpimu karena di dunia ini masih banyak mimpi yang harus di capai”

“Ku olah kata, ku baca makna, ku ikat dalam alinea, ku bingkai dalam bab sejumlah lima, jadilah maha karya”

Ku persembahkan karya tulis ini untuk Ayahanda Muhiddin dan Ibunda Ida tercinta yang senantiasa memberikan motivasi dan do'a serta rela meneteskan keringatnya dalam mencari segenggam rezeki demi keberhasilanku beserta dosen-dosenku terutam dosen pembimbingku, keluarga dan teman-teman yang senantiasa mendoakan ku dan membantu di manapun demi kesuksesanku.

ABSTRAK

MUHAMMAD RUM, 2017. *Peran Forum Mahasiswa Massenrempulu (Formasi) Dalam Mengawal Kebijakan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.* Jurusan Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing Hj. Syahribulan dan Muhajir.

Penelitian tentang Peran forum mahasiswa massenrempulu (formasi) dalam mengawal kebijakan pemerintahan daerah di kecamatan anggeraja kabupaten enrekang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Forum Mahasiswa Massenrempulu (formasi) dalam mengawal kebijakan pemerintah daerah dan apa efektifitas dari peran Forum Mahasiswa Massenrempulu (Farmasi) dalam kebijakan pemerintah daerah.

Metode penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menghasilkan data-data deskriptif yaitu berupa kata-kata yang berbentuk tulisan atau lisan dari individu dan mengarahkan pada tingkat yang alami. Informan di tentukan secara *purposive sampling* berdasarkan karakteristik yang telah ditetapkan. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui beberapa tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan analisis kita dalam melihat peran mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat. Bagaimana peran mahasiswa dalam mengawal kebijakan pemerintah daerah. Peran mahasiswa dalam setiap perubahan tatanan kenegaraan selama ini sudah menjadi jargon dan pilar utama terjaminnya sebuah tatanan kenegaraan yang demokratis. Semua itu tak terlepas dari dunia organisasi mahasiswa yang merupakan sebuah alur dalam pembelajaran diri dan wadah pendewasaan. Selain berfungsi sebagai pembelajaran diri, organisasi mahasiswa merupakan wahana bagi mahasiswa berempati dengan situasi yang terjadi di masyarakat. Negara berkembang layaknya Indonesia, banyak dihadapkan masalah-masalah sosial terutama menyangkut kesenjangan ekonomi, kecurangan, ketidakadilan, dan ketidakstabilan politik. Organisasi mahasiswa bersinggungan langsung dengan persoalan-persoalan ini, sehingga menemukan solusi atas apa yang terjadi.

Kata Kunci: *Peran, Mahasiswa, Kebijakan Pemerintah*

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta telah memberikan kekuatan dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Peran Forum Mahasiswa Massenrempulu (Formasi) Dalam Mengawal Kebijakan Pemerintah Daerah Di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang”**.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai hambatan dan kesulitan. Penulis menyadari bahwa melangkah untuk mencapai suatu tujuan, hambatan dan rintangan menemani silih berganti. Namun, berkat rahmat dan hidayah-Nya disertai usaha dan doa serta dorongan motivasi dari teman-teman seperjuangan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak segala hambatan dan kesulitan yang dihadapi penulis dapat teratasi.

Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta salam penuh hormat dengan segenap cinta ananda hanturkan kepada kedua Orantua tercinta, Ayahanda Muhidin dan Ibunda Ida yang selalu mencurahkan cinta dan kasih sayangnya serta keikhlasan dalam mendidik penulis dengan segala jerih payahnya serta selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1).

Penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih penulis hanturkan kepada Dra. Hj. Syahribulan. K, M.Pd., pembimbing I dan Muhajir, S.Pd., M.Pd., pembimbing II atas kesediannya mencurahkan tenaga, waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis, mulai dari penyusunan skripsi ini terampung.

Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan dengan hormat kepada : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar. Erwin Akib, M.Pd., Ph.D., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah menyetujui dan menerima skripsi, Dr. H. Nursalam, M.Si., Ketua Jurusan Pendidikan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan Dr. Muhammad Akhir, S.Pd., M.Pd., Sekretaris Jurusan Pendidikan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Makassar.

Bapak dan Ibu dosen Jurusan Pendidikan Sosiologi yang telah memberikan banyak ilmu dan berbagi pengalaman selama penulis menimba ilmu di Jurusan Pendidikan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Makassar. Saudara-saudari penulis yang senantiasa memberikan doa dan dukungan kepada penulis demi terselesainya skripsi ini. Buat sahabat-sahabat seperjuangan di Jurusan Prodi Sosiologi FKIP Unismuh Makassar khususnya angkatan 012 dan kawan-kawan dari tanah Massenrempulu tercinta, terima kasih atas kebersamaan dan kekompakan kita selama ini yang penuh keceriaan.

Akhirnya, hanya kepada Allah Swt kita memohon semoga berkat dan rahmat serta limpahan pahala yang berlipat ganda selalu dicurahkan kepada kita dan semoga niat baik, suci serta usaha yang sungguh-sungguh mendapat ridho disisi-Nya. Amin Ya Rabbal Alamin.

Makassar, November 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
MOTTO PERSEMBAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Operasional	12
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	13
1. Konsep Peran	12
2. Konsep Organisasi	16
a. Ciri-ciri Organisasi.....	17
b. Pengertian Teori Organisasi.....	18
c. Misi dan Tujuan Organisasi	18
d. Fungsi Tujuan Organisasi	19
e. Tipe-tipe Tujuan.....	19
3. Kebijakan Pemerintahan Daerah.....	20
a. Kebijakan Publik	21
4. Mengawal Kinerja Pemerintahan Daerah	22
a. Pengertian Kebijakan Pemerintah	27
b. Macam-macam Kebijakan Pemerintah	31

5. Pengertian Pemerintahan Daerah	24
6. Pemerintahan Daerah	25
7. Pengertian Masyarakat	27
8. Landasan Teori Sosiologi.....	29
B. Penelitian Yang Relevan	30
C. Kerangka Pikir	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	33
B. Waktu dan Tempat Penelitian	34
C. Informan Penelitian	34
D. Fokus Penelitian	34
E. Instrumen Penelitian.....	35
F. Data dan Sumber Data	35
G. Teknik Pengumpulan Data.....	36
H. Teknik Analisis Data.....	36
I. Teknik Keabsahan Data	38
J. Jadwal Penelitian.....	39
K. Etika Penelitian	40

BAB IV GAMBARAN DAN HISTORIS LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
1. Sejarah Singkat Kabupaten Enrekang	42
2. Letak Geografis	47
3. Luas Wilayah.....	48
4. Keadaan Sosial Budaya	49
B. Gamabarn Singkat Kantor Kecamatan Anggeraja	51
1. Visi-Misi Kantor Kecamatan Anggeraja.....	51
2. Tujuan dan Sasaran Kantor Kecamatan Anggeraja.....	53
3. Struktur Kantor Kecamatan Anggeraja	55
4. Sensus Penduduk Kecamatan Anggeraja.....	56

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	58
1. Deskripsi Informan Penelitian	59
2. Analisis Deskriptif Hasil Penelitian	60
B. PEMBAHASAN	69

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA	73
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tatanan masyarakat berkeadilan adalah suatu tatanan masyarakat yang bercirikan dengan, tingkat suprastruktur indikasinya adalah bangunan tauhid yang kokoh di batin setiap anggota masyarakat, sehingga dengan bangunan ini masyarakat lebih mengedepankan ajaran-ajaran moral ketauhidan dalam tiap interaksi sosialnya. Tingkat kultur, adanya kondisi masyarakat yang mempunyai ketinggian dan pemerataan tingkat keilmuan (*literer society*), kompetensi dan kapasitas, serta inisiatif dan partisipasi diberbagai bidang kehidupan. Dan tingkat struktur, implementasi suatu tatanan performa kenegaraan yang mengedepankan nilai-nilai keadilan.

Pada tataran ini, keadilan disandingkan dengan suatu sistem keindonesiaan, ini berarti bahwa bangunan umat berkeadilan yang dicita-citakan beserta *value system* yang mendasarinya didorong untuk menjadi pondasi bagi keindonesiaan yang egaliter, demokratis, terbuka dan kosmopolit. Keberhasilan umat yang berkeadilan diukur dari sejauh mana spirit ini juga menopang kondisi Indonesia sebagai negara kebangsaan modern (*modern nation-state*) yang berkeadilan, baik di wilayah ekonomi, politik maupun kebudayaan. Proses demokrasi di Indonesia masih berada pada tataran prosedural belaka dan belum menyentuh wilayah substansialnya.

Kondisi ini membuat negara rentan untuk menjadi korup, otoriter, dan memberangus hak-hak politik rakyat dengan berlindung di balik penegakan hukum yang lemah. Dibutuhkan sebuah sistem politik yang bersendikan hukum dan keadilan serta menjamin penghormatan terhadap kebebasan, harkat, dan martabat masyarakat. Sistem politik tersebut haruslah memberi ruang penegakan hak-hak dan aprtisipasi warga negara (*universal participation*) sebagai wujud keadilan di wilayah politik.

Pada tataran kebudayaan, masyarakat mengalami proses banalisasi budaya, mereka mengalami ketumpulan dan kemunduran rasa kemanusiaan yang adil (*sense of advanced humanity*), menghancurkan diri sendiri (*self destructive*) dan tidak lagi mengenal (*civic culture*). Masyarakat perlu rekayasa yang mampu memperadabkan mereka kembali dengan tetap berbasis kepada kearifan nilai (*local wisdom*) dan keistimewaan lokal (*local uniqueness*).

Peran mahasiswa dalam setiap perubahan tatanan kenegaraan selama ini sudah menjadi jargon dan pilar utama terjaminnya sebuah tatanan kenegaraan yang demokratis. Semua itu tak terlepas dari dunia organisasi mahasiswa yang merupakan sebuah alur dalam pembelajaran diri dan wadah pendewasaan. Selain berfungsi sebagai pembelajaran diri, organisasi mahasiswa merupakan wahana bagi mahasiswa berempati dengan situasi yang terjadi di masyarakat. Negara berkembang layaknya Indonesia, banyak dihadapkan masalah-masalah sosial terutama menyangkut kesenjangan ekonomi, kecurangan, ketidakadilan, dan ketidakstabilan politik. Organisasi mahasiswa bersinggungan langsung dengan persoalan-persoalan ini, sehingga menemukan solusi atas apa yang terjadi.

Mahasiswa definisikan sebagai segmen pemuda yang tercerahkan karena memiliki kemampuan intelektual yang tinggi memiliki kemampuan logis dalam berfikir sehingga dapat membedakan mana benar dan mana yang salah. Sebagai dari pemuda, mahasiswa juga memiliki karakter positif lainnya, antara lain idealis dan energik. Idealis berarti (seharusnya) mahasiswa masih belum terkotori oleh kepentingan pribadi, juga belum terbebani oleh beban sejarah atau beban posisi. Artinya mahasiswa masih bebas menempatkan diri pada posisi yang dia anggap terbaik, tanpa adanya resistansi yang terlalu besar. Mahasiswa seharusnya berada diposisi netral tanpa ada intervensi kepentingan lain.

Tetap berperan dengan idealisme dan independennya. Tanpa memihak kecuali kepada kebenaran. Dengan potensi yang dimiliki mahasiswa, wajar jika pada setiap zaman kemudian pemuda memegang peran penting dalam perubahan sosial masyarakat. Orang-orang yang segera menerima dan mendukung Rasulullah SAW, ternyata adalah para pemuda, bukan orang-orang tua yang saat itu menjadi pemuka kaumnya. Bukan Abu Jahal atau Abu Sufyan, tetapi Umar bin Khathab, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah lah yang kemudian mengusung panji-panji Islam. Bahkan Abu Bakar yang cukup tua pun saat itu baru berusia 37 tahun. Sejarah menunjukkan bahwa selain aktivitas gerakan yang berupa tuntutan-tuntutan terhadap persoalan internal sebuah perguruan tinggi, gerakan mahasiswa juga mampu menemukan momentum-momentum besar yang menyebabkan keterlibatannya dalam perubahan politik nasional menjadi sangat penting. Setelah gerakan pada masa pra kemerdekaan, gerakan mahasiswa tahun 1966 yang meruntuhkan Orde Lama dan menopang lahirnya Orde Baru.

Hingga gerakan penggulingan rejim orde tersebut pada 1998 lalu menunjukkan peran mahasiswa yang signifikan dalam perubahan sosial politik di tanah air. Karena pada dasarnya, gerakan mahasiswa merupakan proses perubahan yang esoterik. Sebenarnya bangsa Indonesia mempunyai tradisi meromantiskan kehidupan kaum muda dan mahasiswa. Periodisasi sejarah gerakan mahasiswa dan pemuda Indonesia dalam angkatan-angkatan 1908, 1928, 1945, 1966, dan seterusnya hingga 1998 juga bisa diartikan sebagai pengakuan terhadap peran sentral mahasiswa dalam perkembangan dan perubahan perjalanan bangsa.

Gerakan mahasiswa merupakan wujud kecerdasan masyarakat. Untuk itu mahasiswa harus terus memberikan kontribusi pemikiran dan tindakan dalam membantu masyarakat lainnya, karena ia merupakan bagian dari masyarakat. Jika mahasiswa kehilangan intelektualitasnya dan keberanian dalam membela dan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, maka nasib bangsa Indonesia tidak akan jelas. Dan rakyat akan menjadi korban dari runtuhnya intelektualitas dan idealisme mahasiswa.

Gerakan mahasiswa harus terus mengambil perannya sebagai pelopor perubahan, pengawal pembangunan dan membentuk diri sebagai calon pemimpin masa depan bangsa. Dengan demikian mahasiswa dan gerakannya, akan tetap menjadi tokoh intelektual dan peluang perubahan dalam masyarakat, yang bertanggung jawab dan penuh keberanian. Mahasiswa pada saat ini merupakan harapan terbesar bagi masyarakat menjadi penyambung lidah rakyat utamanya pembawa perubahan di masyarakat (*Agen social of cahange*). Salah satu potensi, mahasiswa sebagai bagian dari kaum muda dalam tatanan masyarakat yang

berperan langsung dalam tiap fenomena sosial, harus mampu mengimplementasikan kemampuan keilmuannya dalam perubahan keumatan kearah yang lebih baik.

Mahasiswa yang aktif berorganisasi secara konsisten, semata-mata memiliki pemahaman bahwa organisasi kemahasiswaan merupakan sebuah sarana yang efektif dalam mengkader dirinya sendiri untuk kedepan. Sebagian diantaranya masih mempunyai keyakinan pandangan bahwa kampus merupakan tempat menimba ilmu yang tidak terbatas hanya kepada pelajaran semata.

Akan tetapi organisasi ekstra kampus merupakan tempat yang wajib bagi setiap akademisi kampus. Dengan bergabung aktif dalam organisasi kemahasiswaan yang bersifat *intra* ataupun *eksra* kampus berefek kepada perubahan yang signifikan terhadap wawasan, cara berpikir, pengetahuan dan ilmu-ilmu sosialisasi, kepemimpinan serta manajemen kepemimpinan yang *notabene* tidak diajarkan dalam kurikulum normatif Perguruan Tinggi. Namun, dalam berorganisasi dapat diraih dengan memanfaatkan statusnya sebagai mahasiswa. Pemahaman arti penting sebuah organisasi dan aktivitas organisasi mahasiswa adalah salah satu persoalan yang pertama-tama harus diluruskan. Adanya anggapan bahwa berorganisasi berarti berdemonstrasi atau berorganisasi khususnya di kampus tidak lebih dari sekadar membuang sebagian waktu, energi, ajang mencari kawan atau mencari jodoh merupakan bukti adanya kesalahpahaman tentang persepsi sebagian mahasiswa tentang organisasinya sendiri. Berdasarkan hal tersebut, organisasi mahasiswa dituntut untuk terus meningkatkan kualitas dirinya.

Dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sebagai miniatur pemerintahan negara dalam penyelenggaraan negara yang semestinya dilakukan oleh aparatur negara. Maka, organisasi mahasiswa harus mengadopsi prinsip-prinsip pemerintahan layaknya dalam sebuah negara dan dikolaborasikan dengan prinsip sebagai organisasi pengkaderan dan perjuangan. Dengan demikian, satu media yang dapat membentuk kematangan mahasiswa dalam hidup bermasyarakat ialah organisasi.

Sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa dibutuhkan sebuah agen untuk bisa diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan berbagai potensi dan kesempatan yang dimiliki oleh mahasiswa, tidak sepantasnyalah bila mahasiswa hanya mementingkan kebutuhan dirinya sendiri tanpa memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negaranya. Mahasiswa itu sudah bukan siswa yang tugasnya hanya belajar, bukan pula rakyat, bukan pula pemerintah. Mahasiswa memiliki tempat tersendiri di lingkungan masyarakat, namun bukan berarti memisahkan diri dari masyarakat. Ada beberapa agen yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa adalah sebagai *iron stock*, *agen of change*, *Guardian of Value*, *Moral Force* dan *Sosial Control*. Mahasiswa pada saat ini merupakan harapan terbesar bagi masyarakat sebagai penyambung lidah rakyat terutama sebagai perubahan di masyarakat (*Agen social of cahange*). Sebagai salah satu potensi, mahasiswa sebagai dari kaum muda dalam tatanan masyarakat yang mau tidak mau pasti terlibat langsung dalam tiap fenomena sosial, harus mampu mengimplementasikan kemampuan keilmuannya dalam akselerasi perubahan keumatan ke arah berkeadaban.

Keterlibatan mahasiswa dalam setiap perubahan tatanan kenegaraan selama ini sudah menjadi jargon dan pilar utama terjaminnya sebuah tatanan kenegaraan yang demokratis. Romantisme politis antara mahasiswa dengan rakyat terlihat sebagai fungsinya sebagai *social control* termasuk terhadap kebijakan menindas. Mahasiswa dalam hal ini sudah menunjukkan diri sebagai salah satu potensi yang dapat diandalkan dalam upaya menuju tatanan masyarakat yang berkeadilan. Dan distribusinya baik secara kualitas maupun kuantitas dalam segala aspek kehidupan sosial sudah semestinya diperhitungkan. Bentuk keberhasilan dalam mewujudkan sebuah tatanan masyarakat berkeadaban di Indonesia adalah dengan semakin kecilnya angka kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, peningkatan taraf ekonomi dan pendidikan, dan lain sebagainya. Namun, itu semua hanya akan menjadi mimpi belaka manakala semua konsep-konsep yang dibangun dan berbasis kerakyatan tersebut tidak dibarengi dengan strategi yang matang dan jitu ke arah tujuan tersebut. Dan maksimalisasi fungsi mahasiswa dan kaum muda dalam tiap laju demokratisasi merupakan salah satu pilar utama yang perlu diperhatikan.

Sekali lagi, peran mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat sosial ditunggu. Diharapkan mahasiswa mampu memainkan peran yang strategis. Kesatuan visi, tekad, dan perjuangan untuk kepentingan masyarakat secara luas, menjadi pondasi utama peran tersebut saat ini atau nanti. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, sekali lagi, perlu pemetaan, perumusan, dan penelaahan metode penerapan fungsi mahasiswa dalam kancah epistemologi keumatan tersebut.

Terkait gerakan mahasiswa organisasi Forum Mahasiswa Massenrempulu adalah salah satu organisasi kemahasiswaan berbasis daerah yang ikut dalam mengawal kebijakan pemerintahan daerahnya di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang. Dengan adanya gerakan Forum Mahasiswa Massenrempulu atau Formasi ini, dapat berkontribusi nilai-nilai kebaikan dan keadilan demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Gerakan Forum Mahasiswa Massenrempulu juga ikut serta membantu masyarakat dalam mengawasi kebijakan pemerintah. Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting pada organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program maupun pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya.

Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah dan hari ke hari yang membawa dampak pada warga negaranya. Peran serta Forum Mahasiswa Massenrempulu (Formasi) terhadap kinerja pemerintah merupakan bentuk dari kesadaran partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pada awalnya fungsi yang diperankan oleh Forum Mahasiswa Massenrempulu (Formasi) adalah melakukan kontrol sosial serta membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk bersikap kritis terhadap kebijakan pembangunan. Peran Forum Mahasiswa Massenrempulu (Formasi) dalam pemberdayaan masyarakat adalah fasilitator yaitu melakukan persiapan masyarakat, menjembatani kepentingan pemerintah dan masyarakat, dengan demikian konflik dapat terdeteksi lebih awal. Peran lainnya adalah advokasi (*advocacy*) yang ditujukan sebagai korelasi atas penyimpangan-penyimpangan.

Secara operasional, kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga pemerintah yang sudah ada di masyarakat serta disini Formasi menempatkan diri sebagai pendamping (*fasilitator* dan *motivator*) yang bersifat komplementer terhadap program-program pemerintah. Yang membedakan peran Formasi dan pemerintah adalah strategi dan pendekatan yang dipakai, kegiatan pemerintah pada umumnya bersifat massal, parsial dan kurang memperhatikan unsur partisipasi, sedangkan kegiatan Formasi umumnya bersifat terbatas, namun menyeluruh, mencakup persiapan sosial dan pembinaan secara intensif.

Dengan mengacu pada dasar pemikiran inilah, disusun arah penyelenggaraan roda organisasi dalam bentuk Garis-Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO), yang memuat konsepsi penyelenggaraan organisasi secara menyeluruh untuk membangun tatanan pencapaian tujuan organisasi, serta mewujudkan kemajuan disegala bidang. Mahasiswa merupakan tokoh intelektual dalam masyarakat dan pro pada rakyat. Seluruh bentuk gerakan dan aksi mahasiswa untuk menuju pada cita-cita bangsa, demi kesejahteraan rakyat. Sebagai tokoh intelektual, mahasiswa dalam pergerakannya tidaklah melepaskan karakter kritis dan ilmiah. Forum-forum diskusi inilah yang merupakan pusat studi dan riset mahasiswa, sebelum direncanakan strategi aksi dan pergerakan. Dengan demikian, ketika gerakan dan aksi dilakukan, maka akan mendapat dukungan dari masyarakat secara penuh. Mahasiswa mempunyai kedudukan yang sangat unik yaitu sebagai kaum yang diterima oleh semua lapisan masyarakat dan mempunyai kemampuan intelektual yang tinggi.

Keberadaan tersebut juga didukung oleh karakteristik mahasiswa yang rata-rata masih berusia muda, penuh semangat, dinamis dan tidak takut kehilangan yang merusak idealisme diri. Karena itulah di lingkungan mahasiswa sering disebut mahasiswa sejati. Ketikat terjun ke masyarakat, mereka dapat dengan mudah berbaur dan ketika harus berurusan dengan kaum birokrat mereka mampu mengimbangi dengan kemampuan intelektual dan pendidikannya selama ini. Oleh sebab itu, mereka berperan strategi dalam kehidupan berbangsa yaitu sebagai penerus cita-cita bangsa.

Untuk mengetahui bagaimana peran gerakan Forum Mahasiswa Massenrempulu (FORMASI) pada masyarakat Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, terutama mengenai kebijakan pemerintah kecamatan, maka peneliti mengambil judul *“Peran Forum Mahasiswa Massenrempulu (Formasi) dalam Mengawal Kebijakan Pemerintahan Daerah Di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Forum Mahasiswa Massenrempulu Dalam Mengawal Kebijakan Pemerintah Daerah di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang ?
2. Bagaimana Efektifitas Peran Forum Mahasiswa Massenrempulu Dalam Mengawal Kebijakan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Peran Forum Mahasiswa Massenrempulu Dalam Mengawal Kebijakan Pemerintah Daerah Di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang.
2. Untuk Mengetahui Efektifitas Peran Forum Mahasiswa Massenrempulu Dalam Mengawal Kebijakan Pemerintah Daerah Di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini “*Terkait Peran Forum Mahasiswa Massenrempulu (Formasi) Dalam Mengawali Kebijakan Pemerintah Daerah Di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang*” sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian yang merupakan kajian ilmiah dan aplikasi ilmu pengetahuan diharapkan dapat menjadi wacana bagi penelitian berikutnya.
2. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi masukan bagi pemerintahan daerah Kabupaten Enrekang, khususnya di kecamatan Anggeraja dalam melaksanakan program-program yang merupakan kebijakan dari pemerintah daerah sekitar.
3. Untuk menambah ilmu pengetahuan, utamanya mengenai kebijakan pemerintah yang baik dan benar dan pentingnya peran mahasiswa atau kaum intelektual dalam masyarakat.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu *“Peran Forum Mahasiswa Massenrempulu (Formasi) dalam Mengawal Kebijakan Pemerintahan Daerah Di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang”*, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu :

1. Formasi Maspul yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Forum Mahasiswa Massenrempulu.
2. Pemerintah daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemerintah Kabupaten Enrekang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Konsep Peran

Peran sosial (*social role*) merupakan seperangkat harapan dan perilaku atas status sosial. Menyatakan bahwa setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku kelompoknya.

Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peran. Peranan mencakup beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.

2. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
3. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
4. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial dalam masyarakat.

Peran sosial merupakan tingkah laku individu yang mementaskan suatu kedudukan tertentu. Dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaannya, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Melalui belajar berperan, norma-norma kebudayaan dipelajari. Seseorang dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat. (Soerjono Soekanto, 2006:213).

Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain. Setiap orang pasti akan memiliki peran dalam kehidupan ini, misalnya di lingkungan sekolah, di lingkungan tersebut tentunya akan terdapat peranyang diambil tiap masing-masing individu, seperti peran sebagai kepala sekolah, peran sebagai guru, peran sebagai siswa, dan lain sebagainya. Namun dalam pembahasan ini akan dibatasi pada peranan guru. Sebelum membahas lebih jauh akan lebih baik jika kita mengetahui apa pengetahuan dari peranitu sendiri.

Teori Peran (Role Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia

teater. Dalam teater, seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Selain itu, peranan atau role (Bruce J. Cohen, 1992: 25) juga memiliki beberapa bagian, yaitu:

1. Peranan nyata (*Anacted Role*) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.
2. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
3. Konflik peranan (*Role Conflict*) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
4. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) adalah pelaksanaan peranan secara emosional.
5. Kegagalan Peran (*Role Failure*) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
6. Model peranan (*Role Model*) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
7. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.
8. Ketegangan peranan (*Role Strain*) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain.

Peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku seseorang sesuai dengan status kedudukannya dalam masyarakat. Pengertian peranan diungkapkan oleh Soerjono Soekanto: “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”. (Soerjono Soekanto, 1990: 268). Terdapat dalam ilmu antropologi dan ilmu-ilmu sosial peranan adalah “tingkah laku individu yang mementaskan suatu kedudukan tertentu” (Koentjoroningrat, 1986:35).

2. Konsep Organisasi

Organisasi adalah suatu proses perencanaan yang meliputi penyusunan, pengembangan, dan pemeliharaan suatu struktur atau pola hubungan kerja dari orang-orang dalam suatu kerja kelompok. Organisasi adalah sistem kerja sama antara dua orang atau lebih yang merupakan bentuk kerja sama untuk pencapaian tujuan bersama. Organisasi adalah struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, organisasi adalah suatu wadah atau tempat di mana orang-orang dapat bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa adanya organisasi setiap orang tidak akan mengetahui bagaimana cara melaksanakan bekerja sama tersebut. Dalam berorganisasi, sikap (*attitude*) ataupun (*behavior*) para pelaku organisasi juga menjadi bahan pembicaraan yang harus disimak dengan baik.

Cyrill Soffer dalam bukunya Akhmad Sukhi dan Mohammad Jauhar (2013: 3), menyatakan bahwa

“Organisasi adalah perserikatan orang-orang yang masing-masing diberi peran tertentu dalam suatu system kerja dan pembagian di

mana pekerjaan itu diperinci menjadi tugas-tugas, dibagikan kemudian digabung lagi dalam beberapa bentuk hasil. Secara umum dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah sekelompok orang yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama'.

Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Organisasi yang dianggap baik adalah organisasi yang dapat diakui keberadaannya oleh masyarakat di sekitarnya, karena memberikan kontribusi seperti; pengambilan sumber daya manusia dalam masyarakat sebagai anggota-anggotanya sehingga menekan angka pengangguran. Orang-orang yang ada di dalam suatu organisasi mempunyai suatu keterkaitan yang terus menerus. Rasa keterkaitan ini, bukan berarti keanggotaan seumur hidup. Akan tetapi sebaliknya, organisasi menghadapi perubahan yang konstan di dalam keanggotaan mereka, meskipun pada saat mereka menjadi anggota, orang-orang dalam organisasi berpartisipasi secara relatif teratur.

a. Ciri-ciri Organisasi

Adapun ciri-ciri suatu organisasi adalah sebagai berikut:

1. Lembaga social yang terdiri atas kumpulan orang dengan berbagai pola interaksi yang ditetapkan.
2. Dikembangkan untuk mencapai tujuan.
3. Secara sadar dikoordinasikan dan, dengan sengaja, disusun.
4. Instrument social yang mempunyai batasan yang secara relative diidentifikasi.

b. Pengertian Teori Organisasi

Teori organisasi secara umum bias diartikan sebagai suatu pikiran yang merupakan suatu sekelompok orang yang membagi tugas secara terstruktur untuk mendapatkan pedoman yang ingin di capai bersama-sama. Teori organisasi adalah teori yang berusaha menerangkan atau meramalkan bagaimana organisasi dan orang di dalamnya berperilaku dalam berbagai struktur organisasi budaya dan lingkungan untuk mencapai tujuan.

c. Misi dan Tujuan Organisasi

Sebelum organisasi menentukan tujuannya, misi/maksud organisasi lebih dahulu ditetapkan. *Misi* adalah suatu pernyataan umum dan abadi tentang maksud organisasi. Sedangkan misi organisasi adalah maksud khas (unik) dan mendasar yang membedakan organisasi dari organisasi-organisasi lainnya dan mengidentifikasi ruang lingkup operasi dalam hal produk dan pasar.

Etzioni mengidentifikasi tujuan organisasi sebagai.

1. Suatu pernyataan tentang keadaan yang diinginkan di mana organisasi bermaksud untuk merealisasikan.
2. Pernyataan tentang keadaan di waktu yang akan datang di mana organisasi sebagai kolektifitas mencoba untuk menimbulkannya.

Terdapat dua unsure penting tujuan, yakni:

1. Hasil-hasil akhir yang diinginkan di waktu mendatang di manausaha-usaha/ kegiatan-kegiatan sekarang diarahkan.
2. Tujuan dapat berupa tujuan umum, tujuan khusus, dan tujuan akhir. Tujuan umum (tujuan strategis) secara operasional tidak dapat

berfungsi sebelum dijabarkan terlebih dahulu, ke dalam tujuan-tujuan khusus yang lebih terperinci sesuai dengan jenjang manajemen, sehingga membentuk hierarki tujuan.

d. Fungsi Tujuan Organisasi

Terdapat beberapa fungsi tujuan organisasi, antara lain:

1. Pedoman bagi kegiatan ini dilakukan melalui penggambaran hasil-hasil di waktu yang akan datang. Fungsi tujuan memberikan arah dan pemusatan kegiatan organisasi mengenai apa yang harus dan tidak harus dilakukan.
2. Sumber legitimasi. Ini akan meningkatkan kemampuan organisasi untuk mendapatkan sumber daya dan dukungan dari lingkungan di sekitarnya.
3. Standar pelaksanaan. Bila tujuan dilaksanakan secara jelas dan dipahami, ini dapat memberikan standar langsung bagi penilaian pelaksanaan kegiatan (prestasi) organisasi.
4. Standar motivasi, ini berfungsi sebagai motivasi dan identifikasi karyawan yang penting. Pada kenyataannya, tujuan organisasi sering memberikan insentif bagi para anggota.
5. Dasar rasional pengorganisasian. Tujuan organisasi merupakan suatu dasar perancangan organisasi.

e. Tipe-tipe Tujuan

Klasifikasi tujuan bagi organisasi, menurut penow, pada umumnya dibedakan menjadi 3 tujuan menurut ‘sudut pandangan mereka yang berkepentingan’, yaitu:

1. Tujuan kemasyarakatan (*societal goals*). Ini berkaitan dengan kelas-kelas organisasi luas yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat.
2. Tujuan keluaran (*output goals*). Ini berkaitan dengan jenis-jenis keluaran tertentu dalam bentuk fungsi-fungsi konsumen. Contoh: barang-barang konsumen, jasa-jasa bisnis.
3. Tujuan sistem (*sistem goals*). Ini berkaitan dengan cara pelaksanaan fungsi organisasi yang tidak tergantung pada barang/jasa yang diproduksi/ tujuan yang diambil.

3. Kebijakan Pemerintah Daerah

Pemerintah dalam peningkatan pelayanan publik terdapat beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal ini biasa juga disebut sebagai kebijaksanaan.

Siagian (2007 : 49), menyatakan bahwa,

“Kebijaksanaan adalah serangkaian keputusan yang sifatnya mendasar untuk dipergunaan sebagai landasan bertindak dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan sebelumnya”.

Kesimpulannya, kebijakan adalah suatu rangkaian keputusan yang telah ditetapkan dengan cara yang terbaik untuk mencapai suatu tujuan yang telahditetapkan sebelum kebijakan tersebut diambil. Secara garis besar ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan, yaitu :

1. Adanya pengaruh tekanan dari luar
2. Adanyapengaruh kebiasaan lama (*konservatisme*)
3. Adanya pengaruh sifat pribadi
4. Adanya pengaruh dari kelompok luar

5. Adanya pengaruh keadaan masa lalu.

Selain itu, terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhi dalam pembuatan kebijaksanaan, yaitu :

1. Sulitnya memperoleh informasi yang cukup
2. Bukti-bukti sulit disimpulkan
3. Adanya berbagai macam kepentingan yang berbeda mempengaruhi pilihan tindakan yang berbeda-beda pula
4. Dampak kebijaksanaan sulit dikenali
5. Umpan balik keputusan bersifat sporadis
6. Proses perumusan kebijaksanaan tidak mengerti dengan benar.

a. Kebijakan Publik

Dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, kita tidak dapat lepas dari apa yang disebut dengan Kebijakan Publik. Kebijakan-kebijakan tersebut kita temukan dalam bidang kesejahteraan sosial, di bidang kesehatan, perumahan rakyat, pembangunan ekonomi, pendidikan nasional dan lain sebagainya.

Namun keberhasilan dari kebijakan-kebijakan tersebut boleh dikatakan seimbang dengan-kegagalan yg terjadi. Oleh karena luasnya dimensi yang dipengaruhi oleh kebijakan publik. Salah satu defenisi yang adalah tentang kebijakan publik adalah “secara luas” kebijakan publik dapat didefenisikan sebagai “Hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”. Selanjutnya Carl Fried memandang kebijaksanaan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan–hambatandan peluang-peluang terhadap kebijakan yang

diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Selain itu, gagasan bahwa kebijakan mencakup perilaku yang mempunyai maksud yang layak mendapat perhatian dan sekaligus harus dilihat sebagai bagian defenisi kebijakan publik yang penting, sekalipun maksud atau tujuan dari tindakan-tindakan pemerintah yang dikemukakan dalam defenisi ini mungkin tidak selalu mudah dipahami. (Carl Freadrich 1969:79)

Proses kebijakan dapat dilukiskan sebagai tuntunan perubahan dalam perkembangan menyiapkan, menentukan, melaksanakan dan mengendalikan suatu kebijakan. Dengan kata lain bahwa proses adalah merupakan keseluruhan tuntunan peristiwa dan perbuatan dinamis.

Carl Freadrich (1969:79), menyatakan bahwa

“Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”.

4. Mengawal Kinerja Pemerintah Daerah

Menyadari pentingnya penanggulangan kemiskinan untuk keberlanjutan berbangsa dan bernegara, maka Formasi Maspul melakukan peranan. Dalam mengawal kinerja pemerintah di Kabupaten Enrekang diranah sosial yaitu program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Enrekang, merupakan bentuk dari kesadaran partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Berkenaan dengan itu, Formasi Maspul akan senantiasa dituntut untuk melakukan pembenahan secara internal organisasi.

Pada awalnya fungsi yang diperankan oleh Formasi Maspul adalah melakukan kontrol sosial serta membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk bersikap kritis terhadap kebijakan pembangunan. Peran Formasi Maspul dalam pemberdayaan masyarakat adalah fasilitator yaitu melakukan persiapan masyarakat, menjembatani kepentingan pemerintah dan masyarakat, dengan demikian konflik dapat terdeteksi lebih awal.

Peran lainnya adalah advokasi (*advocacy*) mengkaji isu-isu sosial di masyarakat yang di maksud adalah keluhan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan, ditujukan sebagai korelasi atas penyimpangan-penyimpangan. Sedangkan misi pokoknya bagaimana membuat masyarakat dapat mengatur dirinya sendiri dan tidak menyerahkan semuanya untuk diurus oleh pemerintah. Artinya Formasi Maspul menjadi rekan kerja pemerintah.

Dalam rangka mempertegas eksistensi organisasi Formasi Maspul sebagai satu-satunya lembaga kemahasiswaan yang representatif untuk mewadahi seluruh pelajar dan mahasiswa massenrempulu, maka hal yang paling strategis untuk dilakukan adalah dengan mempertegas peran dan fungsinya sebagaimana yang diamanahkan dalam konstitusi Formasi Maspul. Upaya pematapan dan penanganan proses pengkaderan secara professional dalam rangka menciptakan kader-kader yang memiliki komitmen dan integritas yang mantap. Pada gilirannya kader-kader tersebut akan memiliki kesiapan baik secara mental maupun konsepsional dalam rangka mendorong dan mewarnai proses dinamisasi peran di Formasi Maspul, masyarakat dan pemerintahan. Pada saat yang bersamaan pula Formasi Maspul diperhadapkan pada sebuah keharusan organisatoris.

Sebagai sebuah organisasi yang pada pundaknya melakukan tanggung jawab sosial untuk turut memainkan peran-peran strategis dalam menentukan masa depan Massenrempulu kearah yang lebih baik. Oleh sebab itu, dalam momentum musyawarah besar sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi menetapkan beberapa rekomendasi organisasi baik untuk lingkup internal maupun eksternal organisasi sebagai salah satu bentuk penjabaran dari *strong point* kebijakan organisasi yang harus segera direalisasikan dalam waktu dekat demi menjawab beberapa kebutuhan mendasar organisasi secara khusus dan aspirasi masyarakat Massenrempulu secara umum.

5. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah adalah bagian dari Negara. Seperti banyak tercantum dalam teori mengenai Negara, unsur-unsur suatu Negara umumnya terdiri dari wilayah, rakyat, pemerintah dan kedaulatan. Sering pula unsur ini ditambah dengan tujuan Negara. Dengan kumpulan unsur-unsur Negara seperti ini menjadi jelas bahwa pemerintahan adalah alat atau sarana untuk mencapai tujuan Negara.

Makna pemerintah dan pemerintahan akan banyak tergantung dari isi tujuan Negara dan cara-cara yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan Negara tersebut. Pemerintah adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan, adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat, dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik objek materi maupun formal, universal sifatnya, sistematis serta spesifik.

Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” memiliki empat unsur yaitu, ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. Apabila dalam suatu Negara kekuasaan pemerintahan, dibagi atau dipisahkan maka terdapat perbedaan antara pemerintahan dalam arti luas dengan pemerintahan dalam arti sempit. (Kencana 2001:178).

Pemerintahan dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan disebut juga eksekutif, sedangkan pemerintahan dalam arti luas selain eksekutif termasuk juga lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan disebut legislatif dan yang melaksanakan peradilan disebut yudikatif. Menurut Robert Mac Iver dalam Inu Kencana (2001), “*Government is a organization of men under authority, how men can be govern*”.Maksudnya, pemerintah adalah suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan, bagaimana manusia itu bisa diperintah. Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah).

6. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu di bagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota.

Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Selain itu, peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom yaitu untuk melakukan:

1. Desentralisasi yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewenangan pemerintah pusat menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI.
2. Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi pertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan.
3. Tugas pembantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten kota dan desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dalam rangka melaksanakan peran desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintah. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hak dan kewajiban pemerintah daerah diwujudkan dalam bentuk rencana kerja dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

Urusan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan dapat memenuhi semua urusan yang menjadi urusan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten dan kota) agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

8. Pengertian Masyarakat

Masyarakat sering dikenal dengan istilah *society* yang membentuk berarti sekumpulan orang yang membentuk sistem yang terjadi komunikasi dalam kelompok tersebut. Menurut Wikipedia, kata masyarakat sendiri diambil dari bahasa Arab, *musyarak*. Masyarakat juga biasa diartikan sebagai sekelompok orang yang saling berhubungan dan kemudian membentuk kelompok yang lebih besar biasanya masyarakat juga diartikan sebagai sekelompok orang yang hidup dalam satu wilayah dan hidup teratur oleh adat didalamnya.

Pengertian masyarakat menurut beberapa ahli:

1. Maclver dan Page dalam Nurani Soyomukti (2010:62) Masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia.
2. Ralft Linton dalam Nurani Soyomukti (2010:63) Masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas – batas yang dirumuskan dengan jelas.

3. Selo Soemardjan dalam Nurani Soyomukti (2010:63) Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan.
4. Auguste Comte dalam Nurani Soyomukti (2010:63) Masyarakat adalah keseluruhan organik yang pada dasarnya selalu terdiri dari bagian-bagian yang saling tergantung.
5. Ansyar dalam Eddy Tukijan (2010:16) Masyarakat merupakan kumpulan para individu yang menyatakan diri mereka menjadi satu kelompok.
6. P.J. Bouman dalam Abdullah Idi (2010:38) Masyarakat merupakan pergaulan hidup yang akrab antara manusia, dipersatukan dengan cara tertentu oleh hasrat-hasrat kemasyarakatan tertentu.

Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan dan suatu sistem dari kebiasaan atau tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan, pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia dan merupakan kumpulan para individu yang menyatakan diri mereka menjadi satu kelompok.

Ciri-ciri suatu masyarakat pada umumnya sebagai berikut.

1. Manusia yang hidup bersama sekurang-kurangnya terdiri atas dua orang.
2. Bergaul dalam waktu cukup lama. Sebagai akibat hidup bersama itu, timbul sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia

3. Sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan.
4. Merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena mereka merasa dirinya terkait satu dengan yang lainnya.

9. Landasan Teori Sosiologi

Beberapa karakteristik dari kelompok sosial, yaitu nilai-nilai kelompok, norma-norma kelompok, peran dan posisi, serta status dan ikatan kelompok, sedangkan tipe-tipe kelompok sosial mencakup *in-group* dan *out-group*, kelompok primer dan kelompok sekunder, serta kelompok formal dan kelompok informal. Pada kelompok informal terdapat juga beberapa bentuk ikatan, antara lain kelompok persahabatan atau persaudaraan, dan klik. Klik ini juga terdiri dari klik vertikal, klik horizontal, klik campuran, serta subklik.

Kesamaan karakteristik mengenai fenomena organisasi biasanya selalu dijadikan dasar dalam menentukan tipologi atau klasifikasi fenomena organisasi. Tipologi atau klasifikasi tersebut mencakup, antara lain organisasi yang bergerak berdasarkan keuntungan, sistem wewenang, tanggapan anggota, keterlibatan emosi anggota, tujuannya, kebutuhan sosial, pembagian biaya dan nilai, luas wilayah, pucuk pimpinan, dan saluran wewenang.

Di dalam organisasi formal terdapat organisasi informal. Berkembangnya organisasi informal ini karena struktur formal tidak dapat memberikan pemenuhan kebutuhan para anggotanya dan juga kebutuhan organisasi (formal) itu sendiri. Keduanya yaitu organisasi formal dan organisasi informal memiliki persamaan dan perbedaan dalam hal tujuannya, mekanisme kontrol, karakteristik dan sebagainya.

Di dalam organisasi formal, birokrasi merupakan salah satu bentuk yang sering kali memiliki konotasi negatif hanya karena ketidaktahuan konsep awal birokrasi oleh masyarakat. Max Weber, seorang sosiolog Jerman, melihat birokrasi yang ideal itu memiliki beberapa sifat, yaitu: (1) adanya pembagian kerja; (2) hierarki otoritas; (3) sistem pemeliharaan dokumen tertulis dan formal; (4) pengaturan, tata cara dan aturan; (5) tenaga ahli terlatih; (6) hubungan yang impersonal. Menurut teori organisasi klasik, rasionalitas, efisiensi, dan keuntungan ekonomis merupakan tujuan organisasi.

Teori ini juga menyatakan bahwa manusia itu diasumsikan bertindak rasional sehingga secara rasional dengan menaikkan upah, produktivitas akan meningkat. Max Weber dengan konsep birokrasi idealnya menekankan pada konsep otoritas dan kekuasaan yang sah untuk melakukan kontrol kepada pihak lain yang berada di bawahnya sehingga organisasi akan terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakefisienan.

B. Penelitian Yang Relevan

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang pernah dilakukan oleh Santoso, tur, pada tahun 2009. *Karakteristik aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Aktivis Organisasi Kemahasiswaan Intra Dan Ekstra Kampus Universitas Negeri Semarang*. Hampir semua isu yang berkembang bisa menjadi bahan isu untuk melakukan aksi demonstrasi. Namun kecenderungan tidak ada kerjasama, Koordinasi dan koalisi dalam mengusung sebuah isu bersama dalam aksi demonstrasi terutama terlihat perbedaan antara aktivis organisasi kemahasiswaan ekstra kampus. Sehingga yang terjadi adalah

mereka seakan-akan menjadi terkotak-kotak dan mengurus kepentingannya masing-masing.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah karakteristik aksi demonstrasi aktivis ORMAWA intra dan ekstra kampus, dengan penekanan yang lebih khusus pada fokus perhatian para aktivis terhadap isu yang diusung melalui aksi demonstrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik aksi demonstrasi yang dilakukan oleh aktivis mahasiswa adalah (1) tidak ada fokus perhatian, pada aktivis ORMAWA intra kampus menempatkan isu local internal perguruan tinggi pada urutan kedua setelah isu nasional politis kemudian diikuti isu-isu yang lainnya. Sedangkan pada aktivis ORMAWA ekstra kampus menempatkan isu lokal internal perguruan tinggi pada urutan terakhir setelah isu-isu yang lainnya. (2) tingkat partisipasi keikutsertaan dalam aksi demonstrasi aktivis ORMAWA intra kampus dengan kriteria''Sedang''.

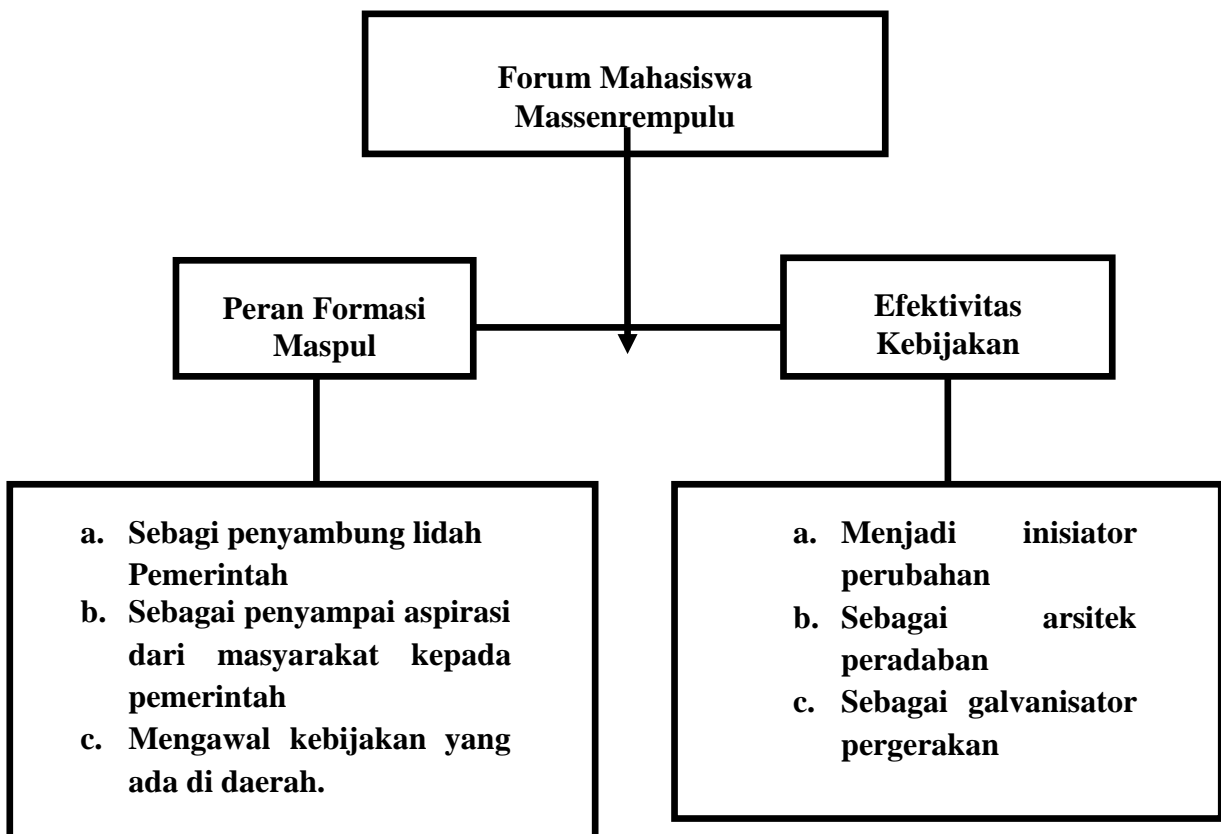
C. Kerangka Pikir

Pada saat yang bersamaan pula Formasi Maspul diperhadapkan pada sebuah keharusan organisatoris sebagai sebuah organisasi yang pada pundaknya melakukan tanggung jawab sosial untuk turut memainkan peran-peran strategis dalam menentukan masa depan massenrempulu kearah yang lebih baik. Oleh sebab itu dalam momentum Musyawarah Besar Luar Biasa sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi menetapkan beberapa rekomendasi organisasi baik untuk lingkup internal maupun eksternal. Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama dan suatu sistem aktifitas kerja sama yang di lakukan dua orang atau lebih.

Dalam rangka mempertegas eksistensi organisasi Formasi Maspul sebagai satu-satunya lembaga kemahasiswaan yang representatif untuk mewakili seluruh pelajar dan mahasiswa massenrempulu, maka hal yang paling strategis untuk dilakukan adalah dengan mempertegas peran dan fungsinya sebagaimana yang diamanahkan dalam konstitusi Formasi Maspul.

Untuk mempermudah penjelasan di atas maka dapat di gambar melalui kerangka pikir di bawah ini :

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian



Bagan Kerangka Pikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan bagaimana *Peran Forum Mahasiswa Massenrempulu (Formasi) Dalam Mengawal Kebijakan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang*.

Penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga sebagai metode ethnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya bersifat kualitatif.

Bogdan dan Biklen (Sugiyono, 2008: 13) menyatakan bahwa “salah satu cirri penelitian kualitatif adalah bersifat deskriptif, dimana data dikumpulkan dalam bentuk kata-kata, atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka”. Metode penelitian kualitatif dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi, mencatat apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai kejadian yang ditemukan di lapangan dan membuat laporan penelitian.

Adapun ciri-ciri pokok dari metode deskriptif adalah :

1. Memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan (saat sekarang) atau masalah-masalah yang aktual.
2. Menggambarkan fakta-fakta tentang masalah-masalah yang diselidiki sebagaimana adanya, diiringi interpretasi rasional.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan yakni, tanggal 10 April sampai dengan 10 Juni 2017, Di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi, di lokasi. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah informan dan responden dari berbagai pihak, yaitu masyarakat Kecamatan Anggeraja, tokoh masyarakat Kecamatan Anggeraja, pengurus Formasi Maspul, pegawai pemerintah Kecamatan Anggeraja.

D. Fokus Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dimulai dari sesuatu yang kosong, tetapi dilakukan berdasarkan persepsi seseorang terhadap adanya suatu masalah. Masalah dalam penelitian kualitatif dinamakan fokus. Pada dasarnya, penentuan masalah menurut Lincoln dan Guba bergantung pada paradigma yang dianut oleh seorang peneliti, yaitu apakah ia sebagai peneliti, evaluator, atau peneliti kebijakan.

Sugiyono menjelaskan bahwa untuk mempertajam penelitian, peneliti kualitatif menetapkan fokus penelitian, yang merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dengan situasi sosial. Penentuan fokus penelitian didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial di lapangan, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah terkait tentang, *Peran*

Forum Mahasiswa Massenrempulu (Formasi) Dalam Mengawal Kebijakan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang).

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan dalam mengumpulkan data. Yang menjadi instrument utama (*key instrument*) dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, sebagai instrument utama dalam penelitian ini, maka peneliti mulai tahap awal penelitian sampai pada hasil penelitian ini seluruhnya dilakukan oleh peneliti. Selain itu, untuk mendukung tercapainya hasil penelitian maka peneliti menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan. Instrumen yang digunakanya itu instrument observasi adalah catatan dan lembar observasi sedangkan instrument wawancara adalah buku catatan atau notebook, tape recorder (perekam) atau handPone, dan camera serta pedoman wawancara.

F. Data dan Sumber Data

Data primer dan data sekunder sebagai berikut ;

1. Data Primer merupakan data yang didapatkan dari informan utama yaitu, data yang diperoleh dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung pada perusahaan dan wawancara langsung dengan pimpinan beserta stafnya yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
2. Data Sekunder merupakan data pelengkap yang didapatkan dari informan, buku-buku, internet, yang dianggap bias memberikan informasi terkait dengan penelitian ini.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam hal ini metode tersebut sebagai penjaring data tentang *Peran Forum Mahasiswa Massenrempulu (Formasi) Dalam Mengawal Kebijakan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang*.

H. Teknik Analisa Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif (Miles dan Huberman, 1984). Dalam model analisis ini, tiga komponen analisisnya yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, aktivitasnya dilakukan dalam bentuk intersaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu proses yang berlanjut, berulang, dan terus-menerus hingga membentuk sebuah siklus. Dalam proses ini aktivitas peneliti bergerak di antara komponen analisis dengan pengumpulan data selama proses ini masih berlangsung.

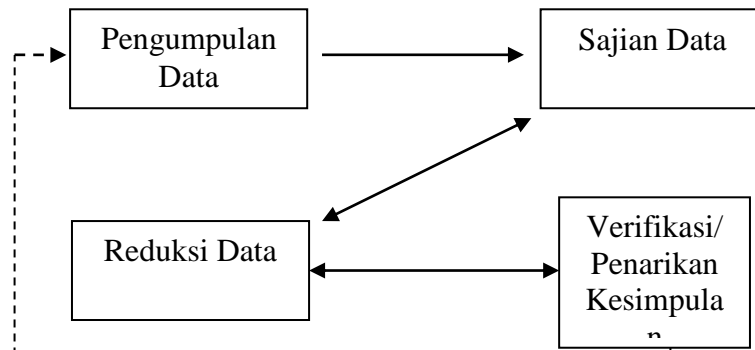
Selanjutnya peneliti hanya bergerak diantara tiga komponen analisis tersebut. Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Dengan demikian reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Secara sederhana dapat dijelaskan dengan “reduksi data” dan perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan, menggolongkannya dalam suatu pola yang lebih luas dan sebagainya.

Sementara itu penyajian data merupakan alur penting yang kedua dari kegiatan analisis interaktif. Suatu penyajian, merupakan kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Sedangkan kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan atau verifikasi (Patton, 1980: 20). Dengan demikian, model analisis interaktif ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Dalam pengumpulan data model ini, peneliti selalu membuat reduksi data dan sajian data sampai penyusunan kesimpulan.

Artinya data yang didapat di lapangan kemudian peneliti menyusun pemahaman arti segala peristiwa yang disebut reduksi data dan diikuti penyusunan data yang berupa ceritera secara sistematis. Reduksi dan sajian data ini disusun pada saat peneliti mendapatkan unit data yang diperlukan dalam penelitian. Pengumpulan data terakhir peneliti mulai melakukan usaha menarik kesimpulan dengan menarik verifikasi berdasarkan reduksi dan sajian data. Jika permasalahan yang diteliti belum terjawab dan atau belum lengkap, maka peneliti harus melengkapi kekurangan tersebut di lapangan terlebih dahulu.

Secara skematis proses analisis interaktif ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar Diagram 3.1. Model Analisis Interaktif Millis dan Hubberman

I. Teknik Keabsahan Data

Demi terjaminnya keakuratan data maka peneliti akan melakukan keabsahan data. Data-data yang salah akan menghasilkan penarikan kesimpulan yang salah, demikian pula sebaliknya data yang sah akan menghasilkan kesimpulan hasil penelitian yang benar.

Penulis memilih keabsahan data dengan pendekatan triangulasi sumber untuk mengungkap dan menganalisis masalah-masalah yang dijadikan objek penelitian. Dalam menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik Trianggulasi, yaitu

1. Trianggulasi sumber, adalah untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, maksudnya bahwa apabila data yang diterima dari satu sumber meragukan, maka harus mengecek kembali ke sumber lain, tetapi sumber daya tersebut harus setara sederajatnya, kemudian peneliti menganalisis data tersebut sehingga menghasilkan suatu kesimpulan dan

dimintakan kesempatan dengan sumber adalah untuk menguji sumber data tersebut.

2. Trianggulasi tehnik, adalah untuk menguji krebilitas data yang di lakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan tehnik yang berbeda,yaitu yang awalnya menggunakan tehnik observasi, maka di lakukan lagi tehnik pengumpulan data dengan tehnik wawancara kepada sumber data yang sama dan juga melakukan tehnik dokumentasi.
3. Trianggulasi waktu, adalah untuk melakukan pengecekan data dengan cara wawancara dalam waktu dan situasi yang berbeda. Seperti, yang awalnya melakukan pengumpulan data pada waktu pagi harridan data yang didapat, tetapi mungkin saja paada waktu pagi hari tersebut kurang tepat karena mungkin informasi dalam keadaan sibuk.

J. Jadwal Penelitian

Pelaksanaan kegiatan ini disesuaikan dengan jadwal sebagai berikut:

Tabel. 3.1 Pelaksanaan kegiatan.

NO	Jenis Kegiatan	Bulan Ke						Ket.
		I	II	III	IV	V	VI	
1	Penyusunan proposal Penelitian							
2	Konsultasi Proposal Penelitian							
3	Seminar Proposal Penelitian							
4	Melakukan Penelitian							
5	Intervensi dan analisis data							
6	Penulisan skripsi							
7	Bimbingan dan konsultasi skripsi							
8	Penyajian ujian skripsi							

K. Etika Penelitian

Peneliti dalam melaksanakan seluruh pelaksanaan kegiatan penelitian harus memegang teguh sikap ilmiah (*scientific attitude*) serta menggunakan prinsip-prinsip etika penelitian.

BAB IV

GAMBARAN DAN HISTORIS LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kabupaten Enrekang

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menganut sistem demokrasi, karena demokrasi merupakan sistem yang sangat tepat bagi Indonesia yang masyarakatnya sangat beraneka ragam, baik secara kultur maupun secara bahasa. Demokrasi di Indonesia pernah dicerai oleh sistem yang sangat otoriter selama 32 tahun yaitu pada masa orde baru. Namun kran demokrasi sekarang sudah terbuka lebar setelah orde baru tumbang dengan ditandai spirit reformasi.

Demokrasi memberikan kebebasan bagi rakyat Indonesia terutama dalam hal berekpresi menyuarakan berbagai aspirasi rakyat. Sekarang bangsa ini telah dikagetkan dengan berbagai fenomena kebijakan pemerintah. Berbagai tanggapan pro dan kontra dari berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa.

Pada saat ini, adanya mahasiswa merupakan salah satu unsur terpenting dalam sebuah pemerintahan, karena dimana mahasiswa telah dianggap sebagai agen pembawa perubahan bagi suatu negara. Dan hal ini merupakan sebuah suatu kebanggaan tersendiri. Peran mahasiswa yang tidak hanya seorang penuntut ilmu saja, akan tetapi juga sebagai wadah yang memberikan solusi bagi suatu permasalahan yang timbul di masyarakat pada suatu negara. Jadi sangatlah tepat jika dikatakan bahwa mahasiswa merupakan suatu golongan akademis yang memiliki tempat tersendiri di dalam lingkungan masyarakat. Hal tersebut

dikarenakan mahasiswa memiliki kelebihan tidak bisa disamakan dengan rakyat biasa, terutama dalam hal perjuangan serta kontribusinya terhadap bangsa dan negara.

Masa depan Bangsa Indonesia sangatlah ditentukan oleh para generasi muda Bangsa ini. Kaum Muda Indonesia adalah masa depan Bangsa ini. Karena itu, setiap pemuda Indonesia, baik yang masih berstatus pelajar, mahasiswa ataupun yang sudah menyelesaikan pendidikannya merupakan factor-faktor penting yang sangat diandalkan oleh Bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan juga mempertahankan kedaulatan Bangsa. Dalam upaya mewujudkan cita-cita dan mempertahankan kedaulatan bangsa ini tentu akan menghadapi banyak permasalahan, hambatan, rintangan dan bahkan ancaman yang harus dihadapi. Masalah-masalah yang harus dihadapi itu beraneka ragam. Banyak masalah yang timbul sebagai warisan masa lalu, masalah yang timbul sekarang maupun masalah yang timbul di masa depan negara kita.

Dengan masalah-masalah yang sudah ada maupun yang akan datang, penting bagi rakyat Indonesia, terutama kaum pemuda dan mahasiswa untuk membiasakan diri dalam meningkatkan dan memperbaiki produktifitas kita Di era Reformasi, para pemuda khususnya mahasiswa selalu berperan dalam perubahan negeri ini. Berbagai peristiwa besar identik dengan peran pemuda dan mahasiswa didalamnya. Dalam sejarah perjuangan Bangsa Indonesia, gerakan pemuda dan mahasiswa sering menjadi tombak perjuangan nasional.

Sejarah panjang gerakan pemuda dan forum mahasiswa merupakan salah satu bukti eksistensi dan tanggung jawab sebagai rakyat Indonesia dalam.

memberikan perubahan dan memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia dalam segala bentuk kebijakan pemerintahan daerah.

Sejak abad XIV, daerah ini disebut MASSENREMPULU' yang artinya meminggir gunung atau menyusur gunung, sedangkan sebutan Enrekang dari ENDEG yang artinya NAIK DARI atau PANJAT dan dari sinilah asal mulanya sebutan ENDEKAN. Masih ada arti versi lain yang dalam pengertian umum sampai saat ini bahkan dalam Administrasi Pemerintahan telah dikenal dengan nama "ENREKANG" versi Bugis sehingga jika dikatakan bahwa Daerah Kabupaten Enrekang adalah daerah pegunungan sudah mendekati kepastian.

Sebab jelas bahwa Kabupaten Enrekang terdiri dari gunung-gunung dan bukit-bukit sambung-menyambung mengambil \pm 85% dari seluruh luas wilayah sekitar 1.786.01 Km². Menurut sejarah, pada mulanya Kabupaten Enrekang merupakan suatu kerajaan besar yang bernama MALEPONG BULAN, kemudian kerajaan ini bersifat MANURUNG dengan sebuah federasi yang menggabungkan 7 kawasan kerajaan yang lebih dikenal dengan federasi "PITUE MASSENREMPULU", yaitu:

1. Kerajaan Endekan yang dipimpin oleh Arung/Puang Endekan
2. Kerajaan Kassa yang dipimpin oleh Arung Kassa'
3. Kerajaan Batulappa' yang dipimpin oleh Arung Batulappa'
4. Kerajaan Tallu Batu Papan (Duri) yang merupakan gabungan dari Buntu Batu, Malua, Alla'. Buntu Batu dipimpin oleh Arung/Puang Buntu Batu, Malua oleh Arung/Puang Malua, Alla' oleh Arung Alla'
5. Kerajaan Maiwa yang dipimpin oleh Arung Maiwa

6. Kerajaan Letta' yang dipimpin oleh Arung Letta'

7. Kerajaan Baringin (Baringeng) yang dipimpin oleh Arung Baringin

Pitu (7) Massenrempulu' ini terjadi kira-kira dalam abad ke XIV M. Tetapi sekitar pada abad ke XVII M, Pitu (7) Massenrempulu' berubah nama menjadi Lima Massenrempulu' karena Kerajaan Baringin dan Kerajaan Letta' tidak bergabung lagi ke dalam federasi Massenrempulu'. Akibat dari politik *Devide et Impera*, Pemerintah Belanda lalu memecah daerah ini dengan adanya Surat Keputusan dari Pemerintah Kerajaan Belanda (*Korte Verkaling*), di mana Kerajaan Kassa dan kerajaan Batu Lappa' dimasukkan ke Sawitto. Ini terjadi sekitar 1905 sehingga untuk tetap pada keadaan Lima Massenrempulu' tersebut, maka kerajaan-kerajaan yang ada didalamnya yang dipecah.

Beberapa bentuk pemerintahan di wilayah Massenrempulu' pada masa itu, yakni:

1. Kerajaan-kerajaan di Massenrempulu' pada Zaman penjajahan Belanda secara administrasi Belanda berubah menjadi *Landshcap*. Tiap *Landschap* dipimpin oleh seorang Arung (*Zelftbesteur*) dan dibantu oleh *Sulewatang* dan *Pabbicara* /Arung Lili, tetapi kebijaksanaan tetap ditangan Belanda sebagai *Kontroleur*. Federasi Lima Massenrempulu' kemudian menjadi: Buntu Batu, Malua, Alla'(Tallu Batu Papan/Duri), Enrekang (Endekan) dan Maiwa. Pada tahun 1912 sampai dengan 1941 berubah lagi menjadi *Onder Afdeling* Enrekang yang dikepalai oleh seorang *Kontroleur* (Tuan Petoro).

2. Pada zaman pendudukan Jepang (1941–1945), Onder Afdeling Enrekang berubah nama menjadi Kanrikan. Pemerintahan dikepalai oleh seorang Bunkem Kanrikan.
3. Dalam zaman NICA (NIT, 1946–27 Desember 1949), kawasan Massenrempulu' kembali menjadi Onder Afdeling Enrekang.
4. Kemudian sejak tanggal 27 Desember 1949 sampai 1960, Kawasan Massenrempulu' berubah menjadi Kewedanaan Enrekang dengan pucuk pimpinan pemerintahan disebut Kepala Pemerintahan Negeri Enrekang (KPN Enrekang) yang meliputi 5 (lima) SWAPRAJA, yakni:
 - Swapraja Enrekang
 - Swapraja Alla
 - Swapraja Buntu Batu
 - Swapraja Malua
 - Swapraja Maiwa

Yang menjadi catatan atau lembaran sejarah yang tak dapat dilupakan bahwa dalam perjuangan atau pembentukan Kewedanaan Enrekang (5 Swapraja) menjadi Daswati Ii / Daerah Swantara Tingkat Ii Enrekang atau Kabupaten Massenrempulu'. (Perlu ingat bahwa yang disetujui kelak dengan nama Kabupaten Dati II Enrekang mungkin karena latar belakang historisnya).

Adapun pernyataan resolusi tersebut antara lain:

1. Pernyataan Partai/Ormas Massenrempulu' di Enrekang pada tanggal 27 Agustus 1956

2. Resolusi Panitia Penuntut Kabupaten Massenrempulu di Makassar pada tanggal 18 Nopember 1956 yang diketuai oleh almarhum Drs. H.M. RISA
3. Resolusi HIKMA di Parepare pada tanggal 29 Nopember 1956
4. Resolusi Raja-raja (ARUM PARPOL/ORMAS MASSENREMPULU) di Kalosi pada tanggal 14 Desember 1956

2. Letak Geografis

Kabupaten Enrekang termasuk dalam salah satu wilayah dalam Provinsi Sulawesi Selatan yang secara astronomis terletak pada $3^{\circ} 14' 36'' - 3^{\circ} 50' 00''$ LS dan $119^{\circ} 40' 53'' - 120^{\circ} 06' 33''$ BT dan berada pada ketinggian 442 m dpl, dengan luas wilayah sebesar 1.786,01 km². Kabupaten Enrekang berbatasan dengan Tana Toraja di sebelah utara, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Sidrap, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidrap dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pinrang.

Gambar 4.1 Peta Kecamatan Anggeraja

PETA KECAMATAN ANGERAJA



3. Luas Wilayah

Luas wilayah Kecamatan Anggeraja adalah 126,96 km dengan jumlah penduduk 23.825 dengan klasifikasi jumlah penduduk laki-laki : 11.909, dan jumlah penduduk perempuan : 11.916 (Sumber : BPS Sensus Penduduk Tahun 2010). Yang terdiri dari 15 Desa/Kelurahan yaitu :

- Kelurahan Lakawan, luas areal : 9,30 Km²
- Kelurahan Tanete, luas areal : 10,45 Km²
- Kelurahan Mataran, luas areal : 4,98 Km²
- Desa Bamba Puang, luas areal : 9,2 Km²
- Desa Siambo, luas areal : 6,51 Km²
- Desa Mampu, luas areal : 10,64 Km²
- Desa Pekalobean, luas areal : 9,92 Km²
- Desa Singki, luas areal : 12,08 Km²
- Desa Salu Dewata, luas areal : 13,15 Km²
- Desa Tindalun, luas areal : 12,18 Km²
- Desa Bubun Lamba, luas areal : 4,33 Km²
- Desa Tampo, luas areal : 7,45 Km²
- Desa Saruran, luas areal : 4,10 Km²
- Desa Batu Noni, luas areal : 5,05 Km²
- Desa Mendante, luas areal : 6,00 Km²

Adapun batas Kecamatan Anggeraja adalah :

- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Masalle

- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Malua, dan Baraka
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Alla
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Enrekang.

4. Keadaan Sosial Budaya

Ditinjau dari segi sosial budaya, masyarakat Kabupaten Enrekang memiliki kekhasan tersendiri. Hal tersebut disebabkan karena kebudayaan Enrekang (Massenrempulu') berada di antara kebudayaan Bugis, Mandar dan Tana Toraja. Bahasa daerah yang digunakan di Kabupaten Enrekang secara garis besar terbagi atas 3 bahasa dari 3 rumpun etnik yang berbeda di Massenrempulu', yaitu bahasa Duri, Enrekang dan Maiwa.

Bahasa Duri dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Alla', Baraka, Malua, Buntu Batu, Masalle, Baroko, Curio dan sebagian penduduk di Kecamatan Anggeraja. Bahasa Enrekang dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Enrekang, Cendana dan sebagian penduduk di Kecamatan Anggeraja. Bahasa Maiwa dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Maiwa dan Kecamatan Bungin. Melihat dari kondisi sosial budaya tersebut, maka beberapa masyarakat menganggap perlu adanya penggantian nama Kabupaten Enrekang menjadi Kabupaten Massenrempulu', sehingga terjadi keterwakilan dari sisi sosial budaya.

Permukiman suku Duri ini berbatasan dengan Tana Toraja. Permukiman orang Duri berada di kecamatan Baraka, Anggeraja dan Alla, yang terdiri dari 17 desa. Hari ini daerah seperti ke Pare-Pare, Toraja, Makassar, hingga ke provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan ke pulau-pulau lain hingga ke Malaysia,

menjadi tempat orang-orang suku Duri bermigrasi. Kekeluargaan dan gotong royong yang tinggi menjadi keseharian sifat orang Duri.

Dahulu, mereka mengenal adanya status sosial dari kaum bangsawan, rakyat biasa dan budak. Hari ini, segala bentuk kasta sosial itu sudah mereka hapuskan. Status sosial yang dianut oleh mereka kini berdasarkan pendidikan dan kekayaan yang dimiliki, kebangsawanan sudah tidak berlaku lagi untuk mereka. Suku Enrekang dan suku Maroangin (Marowangin) merupakan koalisi dari suku Duri yang tergabung dalam satu kesatuan yang disebut sebagai suku Massenrempulu.

Meskipun secara ras dan bahasa suku Duri cenderung dekat dengan suku Toraja. Bahasa Duri mirip dengan bahasa Toraja, oleh karena itu suku Duri sering dianggap sebagai bagian dari suku Toraja. Meskipun memiliki kekerabatan dekat dengan Toraja, suku Duri banyak berpengaruh adat istiadat suku Bugis. Sehingga kadang-kadang orang Duri juga dianggap sebagai sub-suku dari suku Bugis.

Islam menjadi agama bagi sebagian besar orang suku Duri. *Alu' Tojolo* menjadi agama kepercayaan tradisional mereka sebelum Islam masuk ke suku Duri. Agama kepercayaan tradisional ini mirip dengan agama kepercayaan tradisional suku Toraja. Meskipun Islam telah mendarah daging bagi orang suku Duri, namun sebagian kecil orang Duri masih ada yang mempertahankan agama kepercayaan tradisional. Misalnya di Baraka, pengikut agama kepercayaan *Alu' Tojolo* ini mengadakan pertemuan secara teratur 1-2 kali dalam sebulan.

Masyarakat suku Duri juga tetap mempertahankan dan memelihara adat-istiadat sesuai dengan ajaran nenek moyang mereka. Petani menjadi mata

pencarian sebagian besar masyarakat suku Duri. Beberapa di antara mereka menanam tanaman keras dan memelihara hewan ternak. Sebagian kecil lagi membuat barang kerajinan. Adapun tanaman pertanian suku Duri, terdiri dari padi, jagung, ubi, cabai, dan bawang merah.

Selain itu, ada pula yang memproduksi keju yang diolah secara tradisional yang dikenal dengan nama dangke. Keju tersebut diolah dari susu sapi dan kerbau ditambah sari buah atau daun pepaya. Dari uraian di atas, terlihat bahwa suku Duri memiliki hasil pertanian dan peternakan yang cukup beragam. Namun dampak secara ekonomi belum begitu signifikan. Hal tersebut karena infrastruktur berupa jalan yang laik belum mereka dapatkan. Jalan tersebut untuk memperlancar distribusi hasil tani yang akan dijual.

Hari ini tercatat sekitar 60% desa-desa belum memiliki sarana jalan yang memadai. Hal ini mengakibatkan distribusi hasil-hasil bumi mereka menjadi mahal dan memakan waktu yang lama. Diperlukan penyuluhan pertanian untuk mengolah tanah yang kurang subur, belum lagi bantuan modal, dan cara pendistribusian barang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Duri.

B. Gambaran Singkat Kantor Kecamatan Anggeraja

1. Visi – Misi Kantor Kecamatan Anggeraja

Visi merupakan rumusan umum keadaan yang diinginkan jauh ke depan kearah mana organisasi akan di bawa dengan komitmen untuk mampu menggerakkan organisasi agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif. Gambaran kesuksesan pembangunan yang ingin dicapai ke depan dapat dilihat pada visi

pembangunan dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis, aspirasi masyarakat dan pemerintah.

Adapun Visi Kantor Kecamatan Anggeraja adalah sebagai berikut :

- a. Pusat Pelayanan Prima memiliki makna Kantor Kecamatan Anggeraja menjadi sentral tempat pelayanan terbaik bagi pelaksanaan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- b. Kecamatan yang Unggul memiliki makna Kecamatan Anggeraja mampu mengangkat dan menonjolkan keunggulannya baik dari segi pemerintahan, hasil pembangunan, dan kegiatan kemasyarakatan sehingga tercipta keunggulan spesifik / terdapat nilai-nilai khusus yang menjadi ciri khas Kecamatan Anggeraja.
- c. Tahun 2017 adalah rentang waktu yang menunjukkan skala kinerja rencana pencapaian program / ukuran tercapinya rencana strategis dan program kerja yang disusun.

Visi tersebut di atas juga mengandung suatu rangkaian makna yang terjabar pada semua aspek kehidupan masyarakat, pembinaan pemerintahan, dan peningkatan pembangunan di Kecamatan Anggeraja. Visi tersebut juga menunjukkan adanya harapan Kecamatan Anggeraja agar dapat maju dan berkembang secara berkelanjutan dan dapat mendukung tercapainya Visi Kabupaten Enrekang.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi disusun setelah mengkaji makna visi dan keserasiannya dengan lingkungan strategis yang dihadapi dengan

memperhitungkan kemungkinannya untuk dijabarkan dalam arah kebijakan, program, prioritas dan pokok – pokok program dan kegiatan.

Adapun misi kantor Kecamatan Anggeraja adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan sistem pelayanan yang mudah, terukur, dan akuntabel.
2. Menumbuhkembangkan kehidupan masyarakat yang demokratis dan transparan berbasis pada partisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
3. Mewujudkan keharmonisan dan keselarasan tugas aparatur kecamatan berdasarkan proporsi tugas dan kewenangan dengan kapabilitas yang dimiliki.
4. Membangun mekanisme pelayanan secara terintegritas.
5. Mengembangkan seluruh potensi Kantor Kecamatan Anggeraja dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Kantor Kecamatan Anggeraja khususnya dan visi misi Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang.

2. Tujuan dan Sasaran Kantor Kecamatan Anggeraja

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai (dihasilkan) pada kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan tersebut ditetapkan dengan mangacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisi strategis. Selain itu tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada masa akan datang. Diharapkan tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan guna merealisasikan misi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka ditetapkan tujuan yang akan di capai Kantor Kecamatan Anggerja sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan administrasi kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
3. Mendorong terciptanya pemberdayaan masyarakat khususnya perencanaan, pelaksanaan yang bersifat partisipatif, dan pengawasan terhadap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
4. Mendorong terciptanya sinergitas pelaksanaan tugas dengan unit kerja lainnya secara vertikal maupun secara horizontal.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, dapat terukur tentang apa yang akan di capai atau dihasilkan. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan pemerintahan yang bersifat spesifik, dapat diukur, dinilai dan dapat dicapai dengan berorientasi pada hasil yang dicapai dalam kurun waktu tertentu. Sebagai penjabaran tujuan yang ingin dicapai Kantor Kecamatan Anggeraja maka sasaran yang merupakan kondisi ideal yang diharapkan dapat tercipta sebagai hasil dari akumulasi rangkaian kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi Kantor Anggeraja adalah :

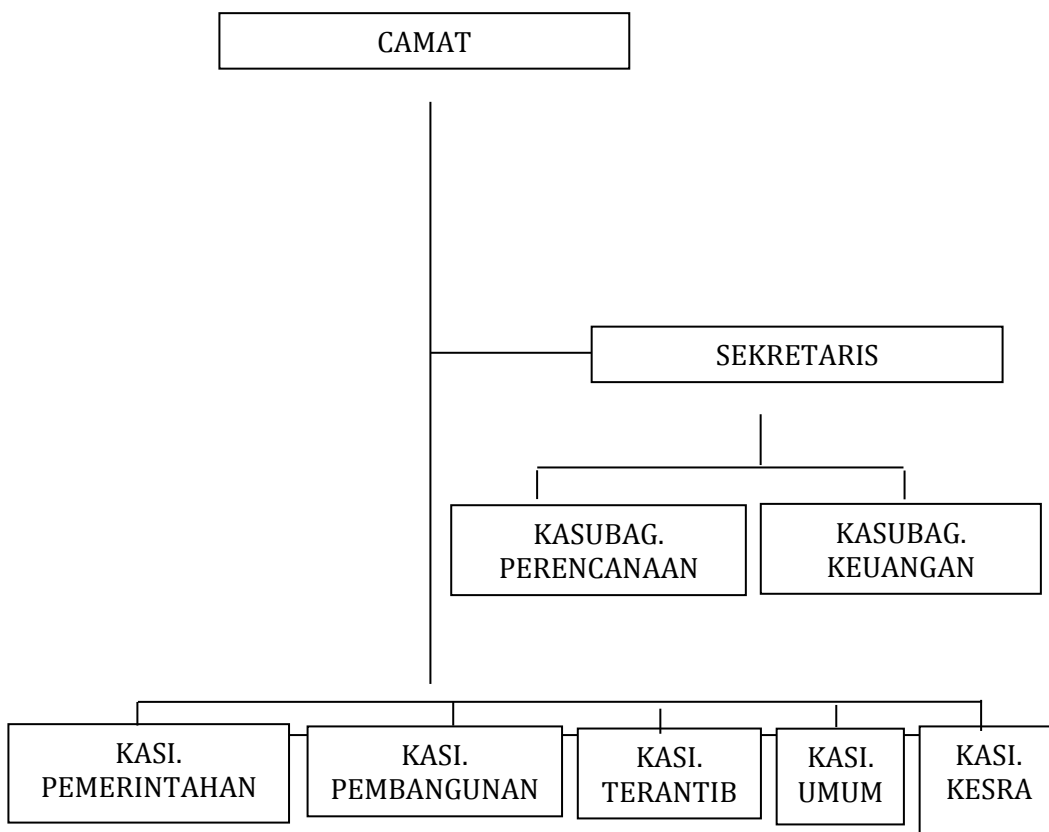
1. Terwujudnya sistem pelayanan prima di Kantor Kecamatan Anggeraja yang berorientasi kepada masyarakat.
2. Terwujudnya sistem pelayanan administrasi pemerintahan , pembangunan dan kemasyarakatan yang partisipatif, responsive dan akuntabel.
3. Terwujudnya prakarsa masyarakat dan optimalisasi kearifan lokal dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan pelaksanaan dan pengawasan terhadap

kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Anggeraja.

4. Terwujudnya optimalisasi koordinasi antar SKPD sehingga mampu bersinergi dalam pelaksanaan tugas, baik secara vertical maupun secara horizontal dalam mendukung terciptanya mekanisme pembangunan.

3. Struktur Kantor Kecamatan Anggeraja

Gambar 4.2 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Anggeraja



Sumber Data : Koordinator Statistik Kecamatan Anggeraja

4. Sensus Penduduk Kecamatan Anggeraja
Jumlah Penduduk Kecamatan Anggeraja berdasarkan data BPS Sensus Penduduk Tahun 2017

No	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah		Jumlah Penduduk		Jumlah Jiwa
				LK	Pr	
1	Lakawan	9.30	Km ²	1,619	1,736	3,355
2	Tanete	10.45	Km ²	1,409	1,401	2,810
3	Mataran	4.98	Km ²	1,279	1,254	2,533
4	Singki	12.08	Km ²	822	751	1,573
5	Siambo	6.51	Km ²	568	482	1,050
6	Tindalun	12.80	Km ²	363	409	772
7	Bamba Puang	10.84	Km ²	938	1,020	1,958
8	Mendatte	4.36	Km ²	329	355	684
9	Saruran	4.10	Km ²	457	473	930
10	Batu Noni	5.05	Km ²	917	885	1,802
11	Tampo	8.45	Km ²	512	526	1,038
12	Bubun Lamba	4.33	Km ²	580	619	1,199
13	Mampu	10.64	Km ²	677	624	1,301
14	Pekalobean	9.92	Km ²	968	928	1,896
15	Salu Dewata	13.15	Km ²	471	453	924
Jumlah		126.96	Km ²	11,909	11,916	23,825

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Enrekang

Kecamatan Anggeraja Dalam Angka Tahun 2017

Tabel 2.1 : Banyaknya Pegawai menurut Instansi/Kantor Pemerintahan di Kecamatan Anggeraja Tahun 2017

No	Nama Instansi Pemerintahan	Banyaknya Pegawai
1.	Kantor Camat Anggeraja	21
2.	Cabang Dinas Dikpora Kecamatan Anggeraja	10
3.	Kantor Urusan Agama	3
4.	Puskesmas/Pustu	3
5.	Petugas PLKB/PPLKB	2
6.	Koordinator Statistik Kecamatan	1
7.	Cabang Dinas Pertanian Dan Perkebunan	3
8.	Cabang Dinas Kehutanan	2
9.	Cabang Dinas Peternakan Dan Perikanan	1
10.	PLN	4
11.	Pos dan Giro	2
12.	BRI Unit Cakke	6
13.	Kantor Lurah Lakawan	6
14.	Kantor Lurah Tanete	6
15.	Kantor Lurah Mataran	6
16.	Kantor PDM	6
Jumlah		82

Sumber : Koordinator Statistik Kecamatan Anggeraja.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Berangkat dari rumusan masalah kedua tentang efektifitas peran forum mahasiswa massenrempulu dalam mengawal kebijakan pemerintah daerah peneliti mengumpulkan data pada saat penelitian.

Adapun efektifitas peran forum mahasiswa massenrempulu dalam mengawal kebijakan pemerintah daerah pernyataan informan dari hasil wawancara.

Untuk tahap analisis, yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat daftar pertanyaan untuk wawancara, pengumpulan data, dan analisis data yang dilakukan sendiri oleh peneliti. Untuk dapat mengetahui sejauh mana informasi yang diberikan oleh informan penelitian, peneliti menggunakan beberapa tahap:

1. Pertama menyusun draf pertanyaan wawancara berdasarkan dari unsur unsur kredibilitas yang akan ditanyakan pada narasumber atau informan.
2. Kedua, melakukan wawancara dengan pegawai kecamatan anggeraja.
3. Ketiga melakukan dokumentasi langsung di kecamatan anggerja untuk melengkapi data-data yang berhubungan dengan penelitian.
4. Keempat, memindahkan data penelitian yang berbentuk daftar dari semua pertanyaan yang diajukan kepada narasumber atau informan.
5. Kelima, menganalisis hasil data wawancara yang telah dilakukan.

Agar pembahasan lebih sistematis dan terarah maka peneliti membagi ke dalam 3 pembahasan, yaitu:

1. Deskripsi Informan Penelitian
2. Analisis Deskriptif Hasil Penelitian
3. Pembahasan

1. Deskripsi Informan Penelitian

Semua informan dalam penelitian ini tidak merasa keberatan untuk disebutkan namanya, adapun informan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bapak ANDI USMAN (Seksi Pemerintahan)

Selama peneliti menjalani proses penelitian dan wawancara Bapak Andi Usman merupakan informan yang peneliti pertama kali wawancara dan berdiskusi. Beliau sangat antusias untuk memberikan informasi yang peneliti butuhkan kapan saja asalkan tidak mengganggu kesibukan beliau dalam bekerja. Dengan penampilan yang ramah, tegas, berwibawa, tugas dalam berbicara beliau bersedia menjawab semua pertanyaan yang diajukan peneliti. Beliau pun tidak segan-segan untuk membantu peneliti mencarikan informan lainnya agar bersedia menjadi informan dalam penelitian. Tidak ada perasaan canggung dalam diri peneliti karena peneliti dan beliau telah saling mengenal sejak peneliti melakukan Penelitian.

2. Ibu SARA (Seksi Keuangan)

Informan kedua yang peneliti wawancarai adalah Ibu Sara Peneliti memiliki kesan bahwa beliau adalah sosok yang tegas tapi sangat ramah Beliau juga sangat antusias membantu peneliti dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Peneliti merasa sudah sangat dekat dengan beliau karena peneliti sudah mengenal beliau ketika peneliti melakukan penelitian. Beliau adalah orang yang senang hati membantu.

3. Bapak HALIM (Seksi Pembangunan)

Informan ketiga adalah Bapak Halim, peneliti lihat sebagai sosok yang tegas, selain itu beliau juga tidak keberatan untuk dimintai waktunya untuk melakukan wawancara. Walaupun peneliti dan beliau baru saling mengenal ketika peneliti meminta kesediaannya untuk menjadi informan dalam penelitian ini tetapi dengan senyum khasnya beliau mengutarakan kesediaannya. Dalam menjawab pun beliau sangat blak-blakan dan santai sehingga tidak ada rasa canggung dalam diri peneliti.

2. Analisis Deskriptif Hasil Penelitian

Analisis deskriptif data penelitian adalah analisis pada data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 3 orang sebagai informan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber atau informan, maka peneliti dapat menganalisis tentang Peran Forum Mahasiswa Massenrempulu Dalam Mangawal Kebijakan Pemerintahan Daerah tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban masyarakat itu sendiri.

Hal tersebut diperkuat dengan adanya pernyataan dari informan penelitian, yang pertama yaitu ANDI USMAN mengenai pertanyaan: “Seperti apa pengaruh pengawalan kebijakan yang dilakukan Forum Mahasiswa Massenrempulu (Formasi) di wilayah Kecamatan Anggeraja?

ia mengatakan bahwa: *“Pengaruhnya sangat baik, mahasiswa mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan apresiasi masyarakat.”*

Dan peneliti juga melakukan wawancara kepada SARA dan dia mengatakan bahwa : *“Pengaruhnya sangat baik. Kebijakan pemerintah daerah di anggeraja*

ini berjalan semestinya semenjak ada pengawasan langsung dari forum Mahasiswa Massenrempulu atau Farmasi ini. Kami sebagai masyarakat merasa dibantu, merasa didampingi dalam kehidupan berpolitik.”

Dan peneliti juga melakukan wawancara kepada HALIM dan dia mengatakan bahwa Apakah tanggapan Anda terkait pengawalan kebijakan yang dilakukan Forum Mahasiswa Massenrempulu (Formasi) di wilayah Kecamatan Anggeraja? ia mengatakan: *“Saya selaku aparat kecamatan turut mendukung pengawalan kebijakan oleh adik-adik mahasiswa formasi maspul, karena dengan adanya kritik dari mahasiswa ini, itu kemudian memberikan sumbangsi bagi kami selaku aparat pemerintah kecamatan dalam melaksanakan program-program kerja yang akan dan sudah kami laksanakan di masyarakat kami, mahasiswa harus hadir dan dapat bekerja sama dengan semua instansi pemerintah daerah dan jajarannya untuk mendistribusikan hasil pengalaman dari kampus/ perguruan tinggi dengan baik dan rapi terkhusus di kecamatan anggeraja itu sendiri.”*

Secara operasional, kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga pemerintah yang sudah ada di masyarakat serta disini Formasi menempatkan diri sebagai pendamping (*fasilitator* dan *motivator*) yang bersifat komplementer terhadap program-program pemerintah. Yang membedakan peran Formasi dan pemerintah adalah strategi dan pendekatan yang dipakai, kegiatan pemerintah pada umumnya bersifat massal, parsial dan kurang memperhatikan unsur partisipasi, sedangkan kegiatan Formasi umumnya bersifat terbatas, namun menyeluruh, mencakup persiapan sosial dan pembinaan secara intensif.

Terkait gerakan mahasiswa organisasi Forum Mahasiswa Massenrempulu adalah salah satu organisasi kemahasiswaan berbasis daerah yang ikut dalam mengawal kebijakan pemerintahan daerahnya di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang. Dengan adanya gerakan Forum Mahasiswa Massenrempulu atau Formasi ini, dapat berkontribusi nilai-nilai kebaikan dan keadilan demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Gerakan Forum Mahasiswa Massenrempulu juga ikut serta membantu masyarakat dalam mengawasi kebijakan pemerintah. Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting pada organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program maupun pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya.

a. Sebagai Penyambung Lidah Pemerintah

Mahasiswa definisikan sebagai segmen pemuda yang tercerahkan karena memiliki kemampuan intelektual yang tinggi memiliki kemampuan logis dalam berfikir sehingga dapat membedakan mana benar dan mana yang salah. Sebagai dari pemuda, mahasiswa juga memiliki karakter positif lainnya, antara lain idealis dan energik. Idealis berarti (seharusnya) mahasiswa masih belum terkotori oleh kepentingan pribadi, juga belum terbebani oleh beban sejarah atau beban posisi. Artinya mahasiswa masih bebas menempatkan diri pada posisi yang dia anggap terbaik, tanpa adanya resistansi yang terlalu besar. Mahasiswa seharusnya berada diposisi netral tanpa ada intervensi kepentingan lain.

Mahasiswa sangat diharapkan untuk bisa melakukan sosialisasi kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah kepada masyarakat. Karena sebagian

masyarakat yang sering salah paham tentang kebijakan pemerintah. Maka dari itu, peran mahasiswa disini sebagai penerjemah tentang maksud dan tujuan dari kebijakan pemerintah. Sehingga bisa dimengerti atau dipahami oleh masyarakat.

Hal tersebut diperkuat dengan adanya pernyataan dari informan penelitian, yang pertama yaitu ANDI USMAN mengenai pertanyaan: “Apakah tanggapan Anda terkait pengawalan kebijakan yang dilakukan Forum Mahasiswa Massenrempulu (Formasi) di wilayah Kecamatan Anggeraja?

ia mengatakan: *“Menurut saya peran mahasiswa sangat penting, salah satunya melakukan pengawalan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Kami sangat mengharapkan peran mahasiswa “*

Dan peneliti juga melakukan wawancara kepada SARA dan dia mengatakan bahwa : *“aja liwa’ iya setuju ibu sara sang, mahasiswa memang mora iya mellao ke denni masalah jio mai masyarakat”* (Saya sangat setuju. Mahasiswa memang diharapkan dapat terjun ke arena politik dalam rangka berpartisipasi dalam pengawasan, formulasi, serta implementasi kebijakan pemerintah)

seperti juga dikatakan oleh informan yang bernama MUHAMMAD IKHSAN ia mengatakan bahwa :

“iya to mahasiswa aja liwa’ di paralluan sang den ona mo na ussen ke masalah politik, mane’ mahasiswa sola masyarakat aja gampang mora to apa lana pau kedenni parallunna, ke edak bang na susi to apa napau pemerintah” (Mahasiswa sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Terutama dalam bidang politik, melalui mahasiswa masyarakat akan lebih muda menyampaikan aspirasinya)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa mahasiswa punya kelebihan dan kekurangan dengan itu hendaknya mereka menjadi ujung tombak perjuangan masyarakat, terutama dalam menghadapi pemerintah dan kebijakannya jika merugikan rakyat. Jika itu terjadi, mahasiswa harus bicara. Harus turun gunung, ke jalanan, ke forum-forum diskusi atau lokasi dan agenda apapun untuk menjadi front pembela masyarakat.

Kemudian dalam hal kebijakan pemerintah daerah, forum mahasiswa selalu berperan aktif dalam melakukan sosial kontrol kebijakan pemerintah daerah, apalagi demokrasi memberikan kebebasan bagi forum mahasiswa terutama dalam hal berekspresi menyuarakan berbagai aspirasi rakyat.

Oleh karena itu, para generasi muda sekarang harus dapat menyikapi setiap kebijakan pemerintah daerah yang terjadi di Kecamatan Anggeraja, selalu mengambil sisi positif, dan meninggalkan sisi negatifnya. Memiliki semangat jiwa muda yang dapat membangun daerah yang mandiri, bersatu dan damai walaupun berbeda agama, suku, dan budaya, dapat berpikir Rasional, Demokratis, dan Kritis dalam menuntaskan segala masalah yang ada di kecamatan Anggeraja.

Hal tersebut diperkuat dengan adanya pernyataan dari informan penelitian, yang pertama yaitu MUHAMMAD IKHSAN mengenai pertanyaan: “Apakah langkah-langkah yang dilakukan Forum Mahasiswa Massenrempulu (Formasi) di Daerah dalam mengawal kebijakan Pemerintah Daerah (PEMDA)? ia mengatakan: *“buda mo to na pugau’ mahasiswa inde’ kampong, iya mo jio salah mesa’ na tolak tambang jio desa buntu batu”* (Banyak yang sudah dilakukan, salah satunya adalah aksi penolakan tambang di desa buntu bantu)

Dan peneliti juga melakukan wawancara kepada ANDI ASIS dan dia mengatakan bahwa : *“male to’ pira aksi ke eda’ bang na susi to apa napau pemerintah kejiongngi kampong, ke male bangngi ala hak na to masyarakat”* (Melakukan aksi-aksi penolakan atas kebijakan yang tidak sesuai dan merebut hak masyarakat)

seperti juga dikatakan oleh informan yang bernama FAHMI ia mengatakan bahwa : *“buda iya to na pugau’ to mahasiswa male tok pira tolak alfa mart sang buda to edak na sicocok ke mentamai”* (Banyak yang sudah dilakukan, salah satunya adalah aksi penolakan Alfa Mart di kecamatan Angeraja)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa selain menjadi pembawa perubahan, fungsi mahasiswa lainnya adalah sebagai generasi pengontrol sosial. Artinya, mahasiswa harus dapat mengendalikan dan menjaga keadaan atau kondisi sosial di lingkungan mereka tinggal atau bahkan di negara. Sebab tujuan pendidikan tinggi bukan hanya pendidikan tetapi juga pengabdian pada masyarakat. Sehingga, memberikan solusi dan memecahkan permasalahan sosial di tengah masyarakat juga merupakan peran dari mahasiswa itu sendiri.

Lebih jauh, penerapan dari fungsi ini adalah pemberian kontrol apabila negara sudah keluar dari jalur dan tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat. Mahasiswa punya andil dalam menyampaikan kritik, saran, dan memberi solusi dalam aksi-aksi lapangan atau cara-cara lain.

b. Penyampai Aspirasi dari Masyarakat kepada Pemerintah

Mahasiswa merupakan salah satu unsur terpenting dalam sebuah pemerintahan, karena dimana mahasiswa telah dianggap sebagai agen pembawa perubahan bagi suatu negara. Dan hal ini merupakan sebuah kebanggaan tersendiri. Peran mahasiswa yang tidak hanya seorang penuntut ilmu saja, akan tetapi juga sebagai wadah yang memberikan solusi bagi suatu permasalahan yang timbul di masyarakat pada suatu daerah.

Jadi sangatlah tepat jika dikatakan bahwa mahasiswa merupakan suatu golongan akademis yang memiliki tempat tersendiri di dalam lingkungan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan mahasiswa memiliki kelebihan tidak bisa disamakan dengan rakyat biasa, terutama dalam hal perjuangan serta kontribusinya terhadap bangsa dan negara.

Mahasiswa merupakan salah satu unsur terpenting dalam sebuah pemerintahan, karena dimana mahasiswa telah dianggap sebagai agen pembawa perubahan bagi suatu negara. Dan hal ini merupakan sebuah kebanggaan tersendiri. Peran mahasiswa yang tidak hanya seorang penuntut ilmu saja, akan tetapi juga sebagai wadah yang memberikan solusi bagi suatu permasalahan yang timbul di masyarakat pada suatu negara atau daerah misalnya kebijakan pemerintah.

Jadi sangatlah tepat jika dikatakan bahwa mahasiswa merupakan suatu golongan akademis yang memiliki tempat tersendiri di dalam lingkungan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan mahasiswa memiliki kelebihan tidak bisa disamakan dengan rakyat biasa, terutama dalam hal perjuangan serta kontribusinya terhadap bangsa dan negara.

Hal tersebut bisa diwujudkan dengan melakukan interaksi sosial terhadap masyarakat. Selanjutnya dengan menganalisa masalah yang ada di masyarakat, lalu menyampaikan realita yang ada di masyarakat dan disertakan solusinya kepada pemerintahan.

Hal tersebut diperkuat dengan adanya pernyataan dari informan penelitian, yaitu M. MUNIR mengenai pertanyaan: “Apakah tanggapan Anda terkait pengawalan kebijakan yang dilakukan Forum Mahasiswa Massenrempulu (Formasi) di wilayah Kecamatan Anggeraja? ia mengatakan: *“Saya selaku aparat kecamatan turut mendukung pengawalan kebijakan oleh adik-adik mahasiswa formasi maspul, karena dengan adanya kritik dari mahasiswa ini, itu kemudian memberikan sumbangsi bagi kami selaku aparat pemerintah kecamatan dalam melaksanakan program-program kerja yang akan dan sudah kami laksanakan di masyarakat kami, mahasiswa harus hadir dan dapat bekerja sama dengan semua instansi pemerintah daerah dan jajarannya untuk mendistribusikan hasil pengalaman dari kampus/ perguruan tinggi dengan baik dan rapi terkhusus di kecamatan anggeraja itu sendiri.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa mahasiswa dapat dikatakan sebuah komunitas unik yang berada di masyarakat, dengan kesempatan dan kelebihan yang dimilikinya, mahasiswa mampu berada sedikit di atas masyarakat. Dengan kesempatan dan kelebihannya tersebut, mahasiswa mampu menjadi alat komunikasi terbaik antara masyarakat dan pemerintah.

Mahasiswa juga belum terkecoki oleh kepentingan-kepentingan suatu golongan, ormas, parpol, dan sebagainya. Sehingga mahasiswa dapat dikatakan

memiliki idealisme. Idealisme adalah suatu kebenaran yang diyakini murni dari pribadi seseorang dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang dapat menggeser makna kebenaran tersebut.

Berdasarkan berbagai potensi dan kesempatan yang dimiliki oleh mahasiswa, tidak sepatutnya bila mahasiswa hanya mementingkan kebutuhan dirinya sendiri tanpa memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negaranya. Mahasiswa adalah generasi perubahan, jika ada sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitar dan itu salah, mahasiswa dituntut untuk merubahnya sesuai dengan harapan sesungguhnya.

B. PEMBAHASAN

Dalam bagian ini akan di bahas hasil penelitian yang diperoleh setelah melakukan observasi, wawancara serta dokumentasi tentang peran mahasiswa dalam mengawal kebijakan pemerintahan daerah. Dengan sifat intelektual dan idealismenya mahasiswa lahir dan tumbuh menjadi model yang memiliki paradigma ilmiah dalam memandang persoalan kebangsaan dan kemasyarakatan. Kalangan mahasiswa mampu membaca, mengkaji, dan berdiskusi secara logis, dan kritis, serta mampu membedah persoalan dari berbagai aspek dan sudut pandang ilmu dan pemikiran. Peran mahasiswa dalam isu-isu publik yaitu mahasiswa sebagai pengawas terhadap pemerintah baik dari segi kebijakan maupun kinerja pemerintah baik di pusat maupun di daerah, apakah kebijakan pemerintah pusat dan daerah tersebut sudah pro terhadap masyarakat atau sebaliknya. Mahasiswa mengawasi dan memberi masukan pada saat perumusan

suatu kebijakan pemerintah, ikut bersama-sama mengawasi implementasi kebijakan yang telah dilakukan, dan mengawasi sekaligus mengevaluasi efektivitas saat pelaksanaan kebijakan dan manfaatnya bagi masyarakat.

1. Organisasi Mahasiswa Massenrempulu

Gerakan mahasiswa organisasi Forum Mahasiswa Massenrempulu adalah salah satu organisasi kemahasiswaan berbasis daerah yang ikut dalam mengawal kebijakan pemerintahan daerahnya di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang. Organisasi ini dinamakan Forum Mahasiswa Massenrempulu disingkat (FORMASI MASPUL). Formasi Maspul didirikan di Makassar pada tanggal 21 September 2011.

Tujuan didirikan Formasi Maspul adalah membina mahasiswa Massenrempulu pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya untuk mencapai akhlak yang baik dalam mengembangkan potensi kreatif, keilmuan, ekonomi, dan sosial budaya. Mempelopori pengenalan, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemaslahatan umat manusia.

Mengamalkan ajaran islam dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berperan aktif dalam dunia pendidikan, kebudayaan, dan kepemudaan untuk menopang pembangunan Massenrempulu secara khusus dan pembangunan nasional secara umum.

2. Peran Forum Mahasiswa Massenrempulu dalam Mengawal Kebijakan Pemerintah Daerah

Mahasiswa masuk dalam kancah dunia politik merupakan sesuatu yang sangat baik jika memang dimaksudkan untuk berperan dalam pengawasan, pengabdian, dan memberi dampak positif terhadap bangsa dan negara. Dilihat kembali dalam sejarah, dasar perubahan khususnya pada dunia politik hampir selalu dilakukan mahasiswa. Mahasiswa terbukti menjadi pelopor dalam sejarah bangsa.

Peran dan pengabdian mahasiswa dalam pengawasan berbagai kebijakan pemerintah dapat diwujudkan dengan membangun organisasi, kelompok, aliansi yang berperan mengawasi dan memberi masukan pada saat perumusan suatu kebijakan pemerintah, ikut bersama-sama mengawasi implementasi kebijakan yang telah dilakukan dan mengawasi sekaligus mengevaluasi efektivitas saat pelaksanaan kebijakan dan manfaatnya bagi masyarakat.

Gerakan berpolitik mahasiswa saat ini kerap ditunjukkan dengan gerakan suatu aksi dengan turun ke jalan. Dalam melakukan gerakan tersebut, kepedulian mahasiswa akan masalah dan situasi politik harus bertumpu pada idealisme kerakyatan, yaitu mengkritisi peran atau kebijakan penguasa yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat dan memberikan solusinya.

Gerakan berpolitik mahasiswa yang dilakukan oleh Forum Mahasiswa Massenrempulu atau Formasi Maspul dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah di kecamatan Anggeraja Kabupaten Endregang adalah melakukan aksi-aksi penolakan atas kebijakan yang tidak sesuai dan merebut hak masyarakat di antaranya adalah aksi penolakan tambang di desa buntu bantu dan juga aksi

penolakan Alfa Mart di kecamatan Anggeraja yang dianggap merebut hak-hak masyarakat.

Masyarakat Anggeraja juga sangat mengharapkan aspirasi dan peran mahasiswa dalam mengawasi kebijakan pemerintah seperti yang dituturkan salah satu masyarakat dalam hasil penelitian peneliti *“‘aja liwa’ iya setuju ibu sara sang, mahasiswa memang mora iya mellao ke denni masalah jio mai masyarakat”* (Saya sangat setuju. Mahasiswa memang diharapkan dapat terjun ke arena politik dalam rangka berpartisipasi dalam pengawasan, formulasi, serta implementasi kebijakan pemerintah). Mahasiswa mampu mempengaruhi kebijakan publik, karena mahasiswa merupakan agen bagi perubahan baik sosial, budaya, paradigma, ekonomi dan politik masyarakat secara luas. Dengan demikian kepentingan masyarakat jadi barometer utama bagi keberhasilan suatu perubahan sosial yang dilakukan oleh mahasiswa. Pemerintah tidak dapat semena-mena membuat kebijakan, terutama kebijakan yang tidak sesuai dengan asas Pancasila dan merugikan masyarakat.

Mahasiswa adalah *iron stock*. *Iron stock* itu diartikan bahwa mahasiswa diharapkan menjadi manusia-manusia tangguh yang memiliki kemampuan dan moralitas baik yang nantinya dapat menggantikan generasi sebelumnya. Di mata masyarakat, mahasiswa adalah pembawa perubahan. Ketika masyarakat terkungkung oleh tirani kezaliman. Mereka juga motor penggerak kemajuan ketika masyarakat melakukan proses pembangunan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Gerakan mahasiswa merupakan wujud kecerdasan masyarakat. Untuk itu mahasiswa harus terus memberikan kontribusi pemikiran dan tindakan dalam membantu masyarakat lainnya, karena ia merupakan bagian dari masyarakat. Jika mahasiswa kehilangan intelektualitasnya dan keberanian dalam membela dan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, maka nasib bangsa Indonesia tidak akan jelas. Dan rakyat akan menjadi korban dari runtuhnya intelektualitas dan idealisme mahasiswa.

Gerakan mahasiswa harus terus mengambil perannya sebagai pelopor perubahan, pengawal pembangunan dan membentuk diri sebagai calon pemimpin masa depan bangsa. Dengan demikian mahasiswa dan gerakannya, akan tetap menjadi tokoh intelektual dan peluang perubahan dalam masyarakat, yang bertanggung jawab dan penuh keberanian. Mahasiswa pada saat ini merupakan harapan terbesar bagi masyarakat menjadi penyambung lidah rakyat utamanya pembawa perubahan di masyarakat (*Agen social of change*). Salah satu potensi, mahasiswa sebagai bagian dari kaum muda dalam tatanan masyarakat yang berperan langsung dalam tiap fenomena sosial, harus mampu mengimplementasikan kemampuan keilmuannya dalam perubahan keumatan kearah yang lebih baik.

B. Saran

Peran mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat sosial ditunggu. Diharapkan mahasiswa mampu memainkan peran yang strategis. Kesatuan visi, tekad, dan perjuangan untuk kepentingan masyarakat secara luas, menjadi pondasi utama peran tersebut saat ini atau nanti. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, sekali lagi, perlu pemetaan, perumusan, dan penelaahan metode penerapan fungsi mahasiswa dalam kancah epistemologi keumatan tersebut.

Terkait peran adik-adik mahasiswa formasi maspul agar kiranya tetap hadir untuk memberikan kontribusi bagi pemerintah dan membangun kerja sama yang baik dalam mengawal setiap kebijakan pemerintah daerah dan setiap pemerintah kecamatan. Karena kehadiran formasi maspul dalam mengawal setiap kebijakan pemerintah sangat membantu kelangsungan kerja kami selaku aparatur pemerintah kecamatan untuk memberikan yang terbaik bagi seluruh masyarakat di kabupaten enrekang secara umum dan khususnya dikecamatan kami kecamatan anggeraja itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abudullah Idi, (2010) *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Ali, Achmad. (2010). *Menguak Teori Hukum: (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Colen J. Bruce. (1992). *Lembaga Sosial (social Intitution) Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT. Rineka Cita.
- Dokumen Perundang-Undangan. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah* .
- Friedrich, Carl J. (1963). *Man And His Government*. New York : McGraw-Hill.
- Koentjoronigrat. (1986). *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia.
- Miles, M. B. dan Huberman, A. M. (1984) *Qualitative Data Analysi : A Source Book or New Methods*. Beverly Hills : Sage Publication.
- Pedoman Dasar Organisasi Forum Mahasiswa Massenrempulu (Formasi Maspul). 9 Maret 2011. [http : // massenrempulu. blogspot. co. id/ 2013/03/bottom-of-form-d-raf-pedoman-dasar.html](http://massenrempulu.blogspot.co.id/2013/03/bottom-of-form-d-raf-pedoman-dasar.html). (diakses 24 Desember 2016).
- Patton, M. Q. (1980). *Qualitative Evaluation Methods*. Baverly Hills, CA. Sage Publication, Miles, M. B. dan Huberman (1984). *Qualitative Data Analysis : Source Book Of New Methods*. Baverly Hills. California. Sage Publication. 1984.
- Soekanto, Soerjono, ed. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Santoso. (2009). *Karakteristik Aksi Demonstrasi Yang Dilakukan Oleh Aktivis Organisasi Kemahasiswaan Intra Dan Ekstra Kampus Universitas Negeri Semarang*. Skripsi Tidak Diterbitkan : Semarang.
- Subekhi Ahkmad, Jauhar. (2013). *Konsep Dasar Organisasi Pengantar Dan Teori Perilaku Organisasi*. Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Syafiie, Inu Kencana. (2001). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung : Refika Aditama.
- Siagian, Sondag. (2007). *Fungsi-fungsi Manejerial edisi revisi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Soyomukti, Munandar. (2010). *Pengantar Sosiologi*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- Sugiyono, (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.
- Soerjono Soekanto. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar* : Lembaga Kemasyarakatan (Lembaga Sosial). Jakarta : Rajawali Pers.

Tukijan, Eddy Dkk, (2010). *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta : Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi.

DOKUMENTASI PENELITIAN

Penelitian pada tanggal 5/007/2017 di Kantor Kecamatan Anggeraja









PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTI

Jl. Jenderal Sudirman No. 100, Kab. Enrekang, Telp./Fax (0841)-21075

ENREKANG

Enrekang, 19 Juni 2017

Kepada

Yth. Camat Anggeraja

Di-

Kec. Anggeraja

Nomor : 468/DPMPTSP/IP/VI/2017

Lampiran : -

Perihal : Izin Penelitian

Berdasarkan Surat Dari Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 975/Izn-5/C.4-VIII/N/37/2017, tanggal 02 Juni 2017, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **Muhammadd Rum**

Tempat Tanggal Lahir : Manggugu, 13 Maret 1994

Identitas :

Alamat : Manggugu Desa Tampo Kec. Anggeraja

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi judul: **"Peran Forum Mahasiswa Massenrempul (Formasi) Dalam Mengawal Kebijakan Pemerintahan Daerah Di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang"**

Dilaksanakan mulai, Tanggal 19 Juni 2017 s/d 20 Juli 2017

Pada prinsipnya dapat menyetujui kegiatan tersebut diatas dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Pemerintah/Instansi setempat.
2. Tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan.
3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 2 (dua) berkas foto copy Skripsi kepada Kepala Kecamatan, Kepala Dinas Pemerintahan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

Demikian untuk mendapat perhatian.

KABUPATEN ENREKANG
Kepala DPMPTSP Kab. Enrekang



Pangkat Pembina Utama Muda
29670329 198612 1 001

Tembusan Yth:

01. Bupati Enrekang (Sebagai Laporan).
02. Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Enrekang.
03. Kepala BAKESRANG POL Kab. Enrekang



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN dan ILMU PENDIDIKAN

Alamat Kantor : Jl Sultan Alauddin No. 259 ☎ (0411) 860 837 Fax (0411) 860 132 Makassar 90221/http://www.fkip-unismuh.info

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

KETERANGAN PERBAIKAN HASIL UJIAN PROPOSAL

Berdasarkan Hasil Ujian :

Nama : MUHAMMAD RUM
 Stambuk : 105.382.463.12
 Program Studi : Pendidikan sosiologi
 Judul : Peran FORUM Mahasiswa Massenompok (FORMASI) Dalam Mengawal Kebijakan Pemerintahan Daerah Di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.....

Oleh tim penguji, harus dilakukan perbaikan-perbaikan. Perbaikan tersebut dilakukan dan disetujui oleh tim penguji sebagai berikut :

No	Tim Penguji	Disetujui Tanggal	Tanda Tangan
1	Syaripuddin S.Pd. M.Pd	2/6/2017	
2	Prof. Dr. Darman Mardani M. Hum	2/6/2017	
3	Prs. H. Muidon, M. Pd	01-05-2017	
4	Dr. Muhammad Akhri. M. Pd.	30-05-2017	

1438 H

Makassar,

2017 M



(Dr. H. Nur Sabirin, M. Si...)



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
KECAMATAN ANGERAJA

JL. JEND. ACHMAD YANI NOMOR. 269, TLP. (0420) 2311191

CAKKE

REKOMENDASI

Nomor : 05/ 76 /AR/VII/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Camat Anggeraja menerangkan bahwa :

Nama : **MUHAMMAD RUM**
Tempat/Tanggal Lahir : Manggugu, 13 Maret 1994
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun Manggugu Desa Tampo Kec. Anggeraja
Judul Penelitian : Peran Forum Mahasiswa Massenrempulu (Formasi) Dalam Mengawal Kebijakan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.

Benar telah mengadakan kegiatan penelitian di wilayah Kecamatan Anggeraja Kab. Enrekang dari Tanggal 19 Juni 2017 s/d 20 Juli 2017

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cakke, 20 Juli 2017
Kecamatan ANGERAJA

KADIR LOGA, S.Pd.
Pang. Pembina Tk. I
NIP. 19671231 199001 1 011



Pedoman Observasi Penelitian
***“Peran Forum Mahasiswa Massenrempulu (Formasi)
 Dalam Mengawal Kebijakan Pemerintah Daerah
 di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang”***

No	Komponen Yang Diamati	Hasil Penamatan		Tanggal Pengamatan
		Ya	Tidak	
1.	Forum Mahasiswa Massenrempulu (Formasi) Melakukan Pengawasan Kebijakan Pemerintah Daerah.			
2.	Data kebijakan Pemerintah Daerah Yang dimiliki Forum Mahasiswa Massenrempulu (Formasi).			
3.	Masyarakat Kecamatan Anggeraja melihat Forum Mahasiswa Massenrempulu (Formasi) Melakukan Pengawasan Kebijakan Pemerintah Daerah.			
4.	Pemerintah mengetahui Forum Mahasiswa Massenrempulu (Formasi) Melakukan Pengawasan Kebijakan Pemerintah Daerah.			
5.	Masyarakat Kecamatan Anggeraja merasakan adanya pengaruh dari Pengawasan Kebijakan Pemerintah Daerah oleh Forum Mahasiswa Massenrempulu (Formasi).			

Hari/Tanggal :

/

Mengetahui,
 Pemerintah Kecamatan
 Anggeraja

RIWAYAT HIDUP



Muhammad Rum, lahir pada tanggal 13 Maret 1994 di Manggugu Desa Tampo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang (Massenrempulu), anak ketiga dari tiga bersaudara buah cinta dan kasih sayang dari pasangan Ayahanda Muhiddin dan Ibunda Ida.

Penulis mulai memasuki dunia pendidikan tingkat dasar pada tahun 1999 di SDN 65 Tampo, Kabupaten Enrekang dan tamat pada tahun 2005, pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan tingkat menengah pertama di SMPN 1 Anggeraja, Kabupaten Enrekang dan tamat pada tahun 2008. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMAN 1 Enrekang pada jurusan IPS dan berhasil menamatkan studinya di sekolah tersebut pada tahun 2012, pada tahun yang sama pula penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi dan terdaftar sebagai salah satu mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) pada jurusan Pendidikan Sosiologi Program Strata Satu (S1). Pada tahun 2014 penulis mengikuti Pendidikan Dasar (DIKDAS), dan pernah jadi Sekertaris Bidangi HUMAS (Hubungan Masyarakat) dan di ketua oleh Alifka Mundi' selama 1 periode pada tahun 2016-2017.

Berkat doa orang tua dan keluarga serta bantuan teman-teman, akhirnya penulis memperoleh gelar S1 setelah berhasil menyusun skripsi yang berjudul “Peran Forum Mahasiswa Massenrempulu (Formasi) Dalam Mengawal Kebijakan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang”.”.